LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

BNN KABUPATEN OKU TIMUR

T.A. 2023

JL. Merdeka Terukis Martapura. Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan

Telepon : (0735) 481444 Faksimili : (0735) 481444

Email : bnnk.okutimur@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program.

Laporan ini merupakan pertanggung jawaban BNN Kabupaten OKU Timur atas pelaksanaan tugas bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten OKU Timur. Hal ini menyiratkan BNN Kabupaten OKU Timur wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kabupaten OKU Timur dalam tahun 2023 yang meliputi kinerja BNN Kabupaten OKU Timur dengan kegiatan yang diprioritaskan ada 11 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja BNN Kabupaten OKU Timur tahun 2023.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kabupaten OKU Timur secara keseluruhan.

Martapura, 15 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten OKU Timur,

Efriyanto Tambunan, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF LKIP BNN KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi BNN Kabupaten OKU Timur	4
E. Sistematika.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Program Kerja (Renproja) Tahun 2020-2024.....	6
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran BNN Kabupaten OKU Timur 2023	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

RINGKASAN EKSEKUTIF
LKIP BNN KABUPATEN OKU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BNN Kabupaten OKU Timur telah menetapkan Target dan Sasaran Kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun realisasi target kinerja BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 yang ditetapkan melalui 11 (sebelas) Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator :

- a. Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Target : **51,10**

Realisasi : **52,65 (103,03%);**

- b. Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Target : **78,69**

Realisasi : **90,982 (115,62%);**

- c. Indeks Kemandirian Partisipasi

Target : **3,25**

Realisasi : **3,57 (109,85%);**

2. Bidang Rehabilitasi dengan 5 Indikator:

- a. Persentase Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Target : **62%**

Realisasi : **86% (138,88%);**

- b. Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih

Target : **10 Orang**

Realisasi : **10 orang (100%);**

- c. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

Target : **2 Lembaga**

Realisasi : **2 Lembaga (100%)**

- d. Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional

Target : **2 Unit**

Realisasi : **2 Unit (100%)**

- e. Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi BNN pada fasilitas Rehabilitasi BNN

Target : **2 Unit**

Realisasi : **2 Unit (100%)**

3. Bidang Pemberantasan dengan 1 Indikator :

- a. Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21
 - Target : **1 Berkas Perkara**
 - Realisasi : **1 Berkas Perkara (100%);**

4. Bagian Umum dengan 2 Indikator :

- a. Nilai Kerja Anggaran (NKA) :
 - Target : **86**
 - Realisasi : **58,06 (98,91%);**
- b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - Target : **92**
 - Realisasi : **97,04 (102,53%)**

Berdasarkan capaian dari indikator kinerja BNN Kabupaten OKU Timur tahun 2023, rata-rata capaian kinerja adalah 106,26%. Dari 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan, terdapat 5 (lima) indikator melebihi target yang ditetapkan, 5 (lima) indikator sesuai target yang ditetapkan, dan 1 (tiga) indikator di bawah target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023, BNN Kabupaten OKU Timur mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 1.544.257.000,- tetapi pada tahun berjalan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 22.320.000,- yang terdiri dari anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 20.000.000,- dan tambahan anggaran untuk layanan SKHPN sebanyak 10 Layanan dengan nilai Rp. 2.320.000,- sehingga total akhir anggaran BNN Kabupaten OKU Timur menjadi Rp. 1.566.577.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.542.940.756,- atau 98,49% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 23.636.244 atau 11,51%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambar Umum

Dari segi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km². Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu sasaran terbesar bagi peredaran gelap narkoba. Pada saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air dan hal ini sangat mengkhawatirkan, kejahatan narkoba sudah menyebar hingga pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa.

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan kontribusi dan sinergitas dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan narkoba dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diberantas dan ditangani secara komprehensif.

Pada Tahun 2021 Pemerintah telah melakukan pembangunan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat kelurahan/ desa yang memiliki kriteria tertentu yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Agar implementasi Desa Bersinar dapat dilakukan secara efektif, BNN menyusun beberapa pedoman teknis dan Kementerian Dalam Negeri juga membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk berperan serta dalam upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kemudian pelaksanaan P4GN dapat dilaksanakan secara massive oleh seluruh komponen bangsa, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional

P4GN Tahun 2020-2024 yang mengamatkan seluruh K/L dan Pemda bersinergi dalam Program P4GN sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing- masing.

Upaya di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh BNN Kabupaten OKU Timur melalui diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pasca rehabilitasi, bidang pemberantasan melalui penyelidikan dan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika

Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang melanda dunia juga berimbas ke Tanah Air, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah keseluruh wilayah tanah air dan menyasar kelapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, dan sasaran Peredaran Narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam tapi sudah merambah ke Pemukiman, Kampus, Sekolah-sekolah, Rumah Kost bahkan lingkungan rumah tangga.

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang sangat berbahaya yang bersifat lintas Negara, kejahatan terorganisir dan kejahatan serius yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan dan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa.

Secara global penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia termasuk warga masyarakat di Kabupaten OKU Timur . Oleh karena itu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara untuk selalu mengkampanyekan Perang Melawan Narkoba (War on Drugs dan Bersih Narkoba (Bersinar) agar kita bisa terlepas dari darurat Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka P4GN selama tahun 2023 yang didanai dari APBN, yang selanjutnya berkewajiban melaporkan kinerja kepada BNN Republik Indonesia melalui BNN Kabupaten OKU Timur dan Pemerintah daerah Kabupaten OKU Timur dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perbendaharaan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kab/ Kota;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BNN;
12. Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/ Kota; dan
13. DIPA Petikan BNN Kabupaten OKU Timur Nomor: SP DIPA - 066.01.2.111079/2023 Tanggal 30 November 2022.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten / Kota.

BNNK / Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK / Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten / Kota;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan Instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- e. Pelayanan administrasi BNNK / Kota;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK / Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perbadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Struktur Organisasi BNNK / Kota terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kepala Subbag Umum
- c. Jabatan Pelaksana
- d. Jabatan Fungsional
- e. Jabatan Pelaksana
- f. Jabatan Fungsional Keuangan
- g. Jabatan Pelaksana Keuangan

E. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi , maksud dan tujuan , ruang lingkup BNN Kabupaten OKU Timur serta sistematika penyajian

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja (Renproja) Tahun 2020-2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi Presiden terpilih periode 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**. Kepala BNN telah menetapkan **visi BNN**, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. **Misi BNN** yaitu:

1. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba;
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Visi dan misi BNN tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tolak ukur dan target capaian Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba sebesar 1,69; serta
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas, dengan tolak ukur dan target capaian Indeks Pelayanan Publik berkategori **“Sangat Baik”**.

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang terukur dan dapat dicapai, BNN menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu :

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator Indeks P4GN;
2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Sumber : Renstra BNN, 2020

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	51.00	51.00	51.00	51.00
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	78.67	78.67	78.67	78.67
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	-	3.40	3.40	3.40	3.40
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang	1 Fasilitas	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

	Masyarakat	layanan rehabilitasi narkotika	operasional					
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	3.2	3.2	3.2	3.2
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	-	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	88	90	90	90	90
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	-	94	94	94	94

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	86.750.000	74.000.000	120.000.000	140.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	-	65.000.000	110.000.000	120.000.000	230.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	103.083.000	186.200.000	194.235.000	235.000.000	260.000.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	-	86.750.000	74.000.000	120.000.000	140.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Komponen Masyarakat		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK					
6.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	35.000.000	-	50.000.000	65.000.000	
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	114.468.000	128.189.000	120.738.000	180.000.000	210.000.000
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	625.012.000	718.664.000	819.239.000	775.000.000	800.000.000

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renproja BNN Kabupaten OKU Timur dalam target tahunan dan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk emncapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Alokasi anggaran BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 16.285.005.000,- dengan rincian sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 16.050.605.000,- dan PNPB sebesar Rp. 234.400.000,-. Adapun rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Pendanaan (Rp)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,10 Indeks	74.000.000
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks	100.000.000
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	189.405.000
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	4.065.000
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	13.400.000
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi operasional yang	2 Lembaga	106.955.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Pendanaan (Rp)
	narkotika			
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4 Indeks	
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	50.000.000
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	1.028.752.000
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	824.830.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Organisasi Eselon III : BNNK OKU TIMUR
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,10 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan system manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2023 BNNK OKU Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2023, sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	51,10 Indeks	52,65 Indeks	103,03%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,69 Indeks	90,982 Indeks	115,62%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,57 Indeks	109,85%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	86,11%	138,88%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi operasional yang	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	narkotika				
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4 Indeks	3,4 Indeks	100%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara (P-21)	100%
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	85,79	99,76%
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	97,09 Indeks	105,53

Dari sebelas indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan :

1. 5 (Lima) indikator melebihi target yang ditetapkan
2. 6 (Enam) indikator sesuai target yang diharapkan

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNK OKU Timur tahun 2023 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

1.	Sasaran : Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja terhadap pengaruh buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
-----------	---

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,10 Indeks	52,65 Indeks	103,03%

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori ‘Tinggi’ adalah kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. Ketahanan diri Individu terhadap dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba dengan menggunakan Self Regulation, Assertiveness, dan Reaching Out sebagai dimensi. Dalam pandangan peneliti, tiga dimensi ini diperlukan individu untuk bertahan dari dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk penyalahgunaan Narkoba.

Self Regulation merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respon perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Assertiveness adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain.

Reaching out didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Definisi Operasional di atas, maka dilakukanlah survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (DEKTARI) di Kabupaten OKU Timur. Aspek Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan Prioritas Nasional di tahun 2023, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Metode kegiatan;
- b. Media kegiatan;
- c. Fasilitas;
- d. Kepesertaan;
- e. Fasilitator;
- f. Moderator;
- g. Penguji peserta kegiatan;
- h. Klarifikasi penilaian hasil capaian.

Adapun klasifikasi kategori hasil capaian sebagai berikut :

- a. Kategori Sangat Tinggi : $\geq 53,71$;
- b. Kategori Tinggi : 49,74 - 53,50;
- c. Kategori Rendah : 45,98 - 49,73;
- d. Kategori Sangat Rendah : $\leq 45,97$

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja (pelajar atau mahasiswa) secara sampling yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK. Pengukuran tersebut mengacu pada Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNNRI dan Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/127/IX/DE/PX.00/2020/BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi oleh penyuluh narkoba di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Berikut ini Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 berdasarkan Surat dari Deputi Pencegahan BNN RI Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN Tanggal 27 Desember 2023 perihal Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA		
		TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	BNNK OKU TIMUR	51,10	52,65	TINGGI

Dari data di atas, didapatkan BNN Kabupaten OKU Timur mendapatkan Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi”, kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya Indeks Ketahanan Diri Remaja di BNN Kabupaten OKU Timur berhasil dilaksanakan dengan adanya dukungan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari seluruh stakeholder dan remaja melalui penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya :

NO	SATUAN KERJA	INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA		
		2021	2022	2023
1	BNNK OKU TIMUR	48,88	49,46	52,65

Dari tabel di atas terlihat bahwa, BNN Kabupaten OKU Timur mengalami peningkatan capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Remaja mulai memahami dan meningkatkan ketahanan dirinya sendiri terhadap penyalahgunaan Narkoba, mengetahui bagaimana mencegah dan menghindari penyalahgunaan Narkoba.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang di hadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi Sumber Daya Tenaga Penyuluh Narkoba di BNN Kabupaten OKU Timur dengan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis, Workshop, Diklat yang berkaitan dengan kompetensi Penyuluh Narkoba.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan :

Kemampuan dan kerjasama yang baik dari Penyuluh Narkoba dalam menyampaikan materi pelatihan dan melaksanakan survey kepada peserta kegiatan beserta form yang harus diisi guna mengukur Indeks Ketahanan Diri Remaja (DEKTARI) setelah pelaksanaan kegiatan. Indikator yang menggambarkan efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Input

Berupa Persentase ketersediaan dokumen adalah jumlah dokumen yang harus tersedia dapat memenuhi dan disediakan seluruhnya sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.

2. Kriteria Proses

- a. Persentase kesesuaian waktu adalah gambaran kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah disusun, dimulai dengan tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Capaian dihitung dari selisih persentase akumulasi jumlah jam keterlambatan dimulainya kegiatan, dibagi dengan 4 (empat) jam pelaksanaan kegiatan;
- b. Persentase kehadiran adalah jumlah peserta yang hadir pada setiap pertemuan dibandingkan jumlah peserta yang tertera dalam undangan;
- c. Persentase kesesuaian materi adalah akumulasi ukuran penilaian yang diperoleh isian dari persentase pada form penilaian kegiatan pelatihan;
- d. Jumlah pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan, dihitung dari pertanyaan yang disampaikan baik oleh peserta yang sama maupun dari peserta lainnya;
- e. Persentase dihitung dari pertanyaan yang dapat dijawab dengan tepat oleh fasilitator pada saat kegiatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

3. Kriteria Output

- a. Seluruh form isian wajib diisi dan dihimpun oleh penyelenggara dalam kondisi utuh;
- b. Seluruh siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib mengisi aplikasi DEKTARI aja;
- c. Setiap siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib;

- d. Menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada aplikasi DEKTARI aja;
- e. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan penilaian pada kategori baik di form kuesioner dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan;
- f. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan dukungan terhadap bentuk kegiatan pelatihan ini dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan;
- g. Laporan kegiatan setiap pertemuan disusun dan tersedia sebagai salah satu media pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan.

Faktor Kegagalan :

Kurang mendukungnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam operasionalisasi pelayanan diseminasi informasi program P4GN baik perlengkapan pengolahan data, sumber daya manusia dan pelatihan bagi petugas.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ayataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai Langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan pengisian untuk DEKTARI sebaiknya peserta yang mengisi harus disosialisasikan cara pengisian form agar pengisian dapat diisi dengan baik dan benar karena jika pengisian dektari tidak sesuai teknis maka mempengaruhi dari hasil DEKTARI;
2. Berkoordinasi dengan guru pembimbing agar guru pembimbing dapat membantu mengarahkan siswanya untuk dapat mengisi form dengan baik dan benar;
3. Memberitahukan kepada guru pembimbing dan siswa tujuan dari pengisian DEKTARI;
4. Sebelum melaksanakan kegiatan sebaiknya penyuluh narkoba terlebih dahulu bertanya mengenai kendala dan hambatan kepada peserta dalam pengisian form terutama dalam pelayanan internet;
5. Penyuluh memberikan penyuluhan sebaik mungkin sehingga peserta dapat mengerti makna, dampak narkoba bagi peserta sehingga peserta dapat mengisi sesuai dengan apa yang disampaikan penyuluh sehingga akan meningkatkan capaian perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten OKU Timur nantinya.

2. Sasaran : Meningkatkan Daya Tangkal Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten OKU Timur TA 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks	90,982 Indeks	115,62%

Untuk mendukung jumlah institusi/lembaga yang responsive dalam penanganan permasalahan narkoba maka dilaksanakan kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba dengan mengukur jumlah institusi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan institusi pendidikan yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba, serta pemberian informasi P4GN dengan mengukur tingkat efektifitas informasi P4GN yang disampaikan.

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal (mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba).

Pentingnya Penguatan Ketahanan Keluarga juga merupakan salah satu unsur pembangunan nasional. Maka diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan narkoba. BNN akan menjadikan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

METODE PENGUKURAN

Hasil Survey perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi Mobile Dektara terhadap desa/kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dimana survey ini dilaksanakan oleh Penyuluh narkoba di wilayah kerja BNN Kabupaten OKU Timur, maka didapatkan hasil Indeks Dektara untuk Tahun 2023

Adapun metode pengukuran Indeks ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan narkoba yaitu :

a. Pengukuran

Setiap BNNK memilih desa/kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi. Pengukuran ini dilakukan secara Nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada (pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan April – Juni 2023 sesuai dengan pembagian waktu masing-masing wilayah).

b. Pemilihan Keluarga

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara simple random sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

c. Pemilihan Responen

Pemilihan 5 (lima) responden keluarga, kemudian dilakukan pemilihan sampel dari 5 (lima) keluarga tersebut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di Bidang Pencegahan BNN Kabupaten OKU Timur.

d. Pengisian Kuisisioner

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

e. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi : 88,31 – 100,00;
2. Kategori Tinggi : 76,61 – 88,30;
3. Kategori Rendah : 65,00 – 76,60;
4. Kategori Sangat Rendah : 25,00 – 64,99.

Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun ini

Berikut Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Indeks Ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 sesuai Surat dari Deputi Pencegahan BNN RI Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN Tanggal 27 Desember 2023 perihal Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahguna Narkoba (Dektara) Tahun 2023, sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	INDEKS KETAHANAN DIRI KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA		
		TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	BNNK OKU TIMUR	78,69	90,982	SANGAT TINGGI

Dari data di atas, didapatkan BNN Kabupaten OKU Timur mendapatkan Nilai Indeks Ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 Berkategori "Sangat Tinggi", kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten OKU Timur berhasil dilaksanakan dengan adanya dukungan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dari para keluarga tentang penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba di lingkungannya.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 Tahun sebelum :

NO	SATUAN KERJA	INDEKS KETAHANAN DIRI KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA		
		2021	2022	2023
1	BNNK OKU TIMUR	79,375	91,607	90,982

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluhan Narkoba baik yang ada di BNN Kabupaten OKU Timur dengan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis, Workshop, Diklat yang berkaitan dengan kompetensi Penyuluhan Narkoba.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Keberhasilan tercapainya Nilai Indeks Ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten OKU Timur TA 2023 tidak terlepas dari peran fasilitator sebagai Penyuluh Narkoba yang berperan aktif dalam memberikan fasilitasi upaya pencapaian target kinerja (PK) BNN Provinsi Sumsel pada Tahun 2023

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai Langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memilih fasilitator yang tepat dan benar-benar memahami materi;
2. Memberikan arahan dalam pengisian form yang telah di sediakan;
3. Memberikan pelayanan dalam pengisian form yang disediakan agar berjalan dengan baik (HP dan Internet)
4. Mengajak peserta berdiskusi dalam pengisian agar tercapai target yang telah kita targetkan

3. Sasaran : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	3,57 Indeks	109,85%

Yang dimaksud dengan indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat yang mandiri (baik *input*, *output* dan *outcome*) dalam P4GN.

Masyarakat dalam hal ini terbagi menjadi 4 bagian :

1. Masyarakat kelurahan dan perdesaan, termasuk di dalamnya LSM, organisasi agama, orsosmas, parpol, komunitas, paguyuban, perkumpulan suku, hobi dan minat serta profesional;

2. Masyarakat dunia pendidikan, yaitu dari mulai pendidikan dasar menengah (diksdasmen) dan perguruan tinggi baik formal maupun non formal;
3. Masyarakat rawan narkoba baik di perkotaan maupun di perdesaan (basis penanaman Ganja);
4. Masyarakat kelompok rentan, seperti : anak jalanan, wanita pekerja seks komersial, pekerja hiburan malam, pekerja berat (kuli bangunan dll);

Pengukuran dilaksanakan setelah peserta menjadi penggiat anti narkoba yang ditandai dengan pelibatangannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan ada tidaknya masukan (*input*), aktifitas (*output*) dan dampak (*outcome*) pemberdayaan anti narkoba dilingkungan kerja dan lingkungan masyarakatnya.

Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mendapatkan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba baik yang dilaksanakan BNN, BNNP dan BNNK, melalui pendataan mandiri di lingkungannya, maksimal sejak 3 bulan pasca mengikuti TOT atau pembinaan alternatif. Untuk sementara penilaian bobot dalam kuesioner partisipasi mandiri belum atau sedang dilaksanakan, sehingga realisasi capaian indikator kinerja tersebut belum tercapai.

Untuk BNN Kabupaten OKU Timur, telah melaksanakan pemberdayaan anti narkoba di lingkungan masyarakat, pemberdayaan anti narkoba di lingkungan pendidikan, pemberdayaan anti narkoba di instansi pemerintah dan pemberdayaan anti narkoba di dunia usaha/swasta. Dari penilaian kemandirian partisipasi masyarakat yang dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa.

Faktor pendukung dalam mencapai indikator kinerja indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah kesadaran untuk berpartisipasi dalam melaksanakan P4GN di lingkungannya masing-masing, salah satunya adalah antusiasme dalam mengikuti pengembangan kapasitas melalui TOT atau pembinaan alternatif lainnya dan disertai dukungan dari lingkungan dalam pelaksanaan P4GN. Kemudian pelayanan yang optimal dari petugas BNN dalam menindaklanjuti pendataan mandiri yang dilaksanakan masyarakat tersebut.

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang terdiri dari lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Dengan semakin aktif penggiat melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi dengan bimbingan teknis dari BNN terdekat. Definisi operasional Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” adalah :

1. Adanya manusia/pelaku/pelaksana (baik tokoh dan penggiat anti narkoba) di suatu lingkungan masyarakat (menjadi figur dan biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya);
2. Adanya metode dalam Pelaksanaan Program P4GN (Kerjasama Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah);
3. Adanya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Kegiatan P4GN;
4. Adanya sarana dan prasarana yang tidak tersedia yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi maupun sudah tersedia, yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluarlingkungannya;
5. Adanya sistem, regulasi, aturan yang mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Masyarakat. (Baik Perda, Pergub, Surat Edaran);
6. Adanya kebiasaan hidup sehat dan teratur yang telah dilaksanakan oleh keluarga di lingkungan tempat tinggal (berolahraga, interaksi aktif antar anggota keluarga, partisipasi masyarakat, adanya sistem keamanan, dan lainnya).

METODE PENGUKURAN

Adapun instrument untuk mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi terdiri dari 6 (enam) aspek sebagai berikut :

- a. Aspek Sumber Daya Manusia, adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

- b. Aspek Metode, adanya cara yang digunakan, diciptakan, dikreasikan, dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan instansi setempat;
- c. Aspek Anggaran, adanya dukungan anggaran baik dari dana swadaya/ sponsorship/bantuan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- d. Aspek Material, adanya peralatan atau media yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungannya;
- e. Aspek Sistem, adanya regulasi, kebijakan, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- f. Aspek Aktivitas / Kegiatan, adanya kegiatan Pencegahan (Penyuluhan / Sosialisasi), Pemberantasan (Pelaporan / Melaporkan), Rehabilitasi (Melaporkan / Konsultasi / Konseling / Pendampingan) di lingkungannya dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pengisian Indeks Kemandirian Partisipasi diawali dengan pemahaman tentang kuesioner para Penggiat Anti Narkotika dan Rencana Aksi dari Penggiat tersebut yang pada akhir kegiatan akan dilakukan pengisian dan penghitungan Indeks Kemandirian Partisipasi. Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan Penggiat P4GN dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh BNN Kabupaten OKU Timur dengan melakukan identifikasi kuesioner IKP dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Indeks Kemandirian Partisipasi dengan kategori “Sangat Mandiri” diperoleh dari hasil olah data monitoring dan evaluasi dengan capaian nilai interval di atas 3,25. Adapun karakteristik kriteria Indeks Kemandirian Partisipasi adalah sebagai berikut :

Jawaban Kuisisioner	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori IKP	Kriteria Mandiri
0	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

4. Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Persentase Penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	86,11%	138,88%

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional Indikator persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu penyalah guna dan/atau pecandu narkotika klien rehabilitasi rawat jalan di Klinik BNN Kabupaten OKU Timur yang mengalami peningkatan kualitas hidup.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti program rehabilitasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen WHOQoL (World Health Organization Quality of Life) yang diberikan kepada Klien pada awal dan akhir program layanan rehabilitasi. Nilai WHOQoL ini akan diinput dalam Sirena (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba) yang selanjutnya dikelola dan diinformasikan oleh Deputi Rehabilitasi kepada satuan kerja sebagai dasar monitoring dan evaluasi layanan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 62% terealisasi sebesar 86,11% dengan capaian target mencapai 138,88%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Kegiatan ini baru ada di Tahun 2023 dan belum dapat diperbandingkan dengan target dan capaian dari tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan target Deputi Rehabilitasi BNN RI, dan pada Tahun 2023 indikator tersebut menjadi target kinerja BNN Kabupaten OKU Timur.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:

Indikator Kinerja Kegiatan ini baru ada di Tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renproja BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2020-2024.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Terbatasnya SDM di klinik pratama di BNN Kabupaten OKU Timur.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan:

1. Adanya SDM yang sudah terlatih;
2. Meningkatkan koordinasi petugas layanan (enumerator) dengan tim peneliti dari pusat, dan Kesulitan komunikasi antara enumerator dengan tim peneliti karena koordinasi dilakukan secara virtual.

Faktor Kegagalan:

1. Adanya klien yang tidak menyelesaikan program sehabilitasi berkelanjutan;
2. Kurangnya pemahaman klien dalam mengisi instrument yang disediakan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba;
2. Meningkatkan koordinasi petugas layanan (enumerator) dengan tim peneliti dari pusat.

5. Sasaran : Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Definisi dari indikator kinerja Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah Memberikan layanan rawat jalan agar pengguna dapat abstan dari penyalah guna narkoba, dapat produktif kembali setelah menjalani rehabilitasi.

Upaya rehabilitasi narkoba dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandunarkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan sehingga dapat mengalami peningkatan kualitas hidup.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional dari Indikator petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang dilatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan bimbingan teknis tatalaksana layanan IBM.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan bimbingan teknis penatalaksanaan layanan IBM dari BNN Kabupaten OKU Timur.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Capaian Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih dengan target 10 Orang terealisasi sebesar 10 Orang dengan capaian target mencapai 100%.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan program dari Deputi Rehabilitasi BNN RI yang diawali dengan Pembekalan dari pusat kepada BNN Provinsi/Kota/Kabupaten. Selanjutnya BNN Kabupaten OKU Timur melakukan pemetaan, koordinasi hingga terbentuknya. Agen Pemulihan yang ditunjuk oleh Lurah atau Kepala Desa. Agen Pemulihan diberi pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan bimbingan teknis selama 3 (tiga) hari di BNN Kabupaten OKU Timur. Dalam pelaksanaannya pemenuhan target Agen Pemulihan yang mengikuti bimbingan teknis tidaklah sulit. Hal ini mengingat masyarakat cukup responsif untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Terbukti dari pemenuhan target jumlah petugas yang diberikan bimbingan teknis mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renproja 2024	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6(5:4x100)
1	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 100 Orang untuk Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi, dapat terealisasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100 Orang dengan persentase capaian 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan :

1. Adanya respon yang baik dari Aparat Desa/Kelurahan menyambut program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
2. Antusias masyarakat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan menjadi Agen Pemulihan;

3. Adanya anggaran (dari BNN) yang diperuntukkan terhadap kegiatan bimbingan teknis.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai Langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya program rehabilitasi khususnya para pengguna;
2. Adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha menggagalkan program IBM yang merasa menjadi ancaman bagi mereka dimana adanya kemungkinan penurunan permintaan (demand) akan zat yang diedarkan dan juga merasa was-was akan aktifitas mereka dari pantauan aparat hukum. Hal ini membuat Agen Pemulihan tidak aman dan nyaman dalam memberikan program;
3. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor;
4. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM;
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.

6.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi Narkotika
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota tahun 2023 yang terdiri dari 2 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

Indikator kinerja ini merupakan keseriusan dan komitmen BNNK OKU Timur untuk melakukan pelayanan Rehabilitasi pada masyarakat yang membutuhkan layanan maupun bantuan dalam hal Rehabilitasi Narkotika ditunjukkan pada indeks pelayanan dengan nilai Baik.

Upaya rehabilitasi narkoba dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandunarkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN

Definisi Operasional Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh bimbingan teknis dan penilaian sesuai dengan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam SNI 8807:2019. Penilaian lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilihat berdasarkan instrument yang telah ditetapkan. Penilaian standar layanan pada dasarnya dilakukan kepada seluruh lembaga rehabilitasi secara bertahap dan telah dimulai semenjak tahun 2019 yang diawali dengan menggunakan instrumen Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya pada tahun 2019 penilaian dilakukan berdasarkan SNI 8807:2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) yang kemudian pada tahun 2022 direvisi menjadi SNI 8807:2022 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Napza. Lembaga rehabilitasi tersebut di atas adalah lembaga rehabilitasi milik BNN di wilayah Kabupaten OKU Timur, lembaga rehabilitasi milik pemerintah lainnya seperti Rumah Sakit atau Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan, Klinik atau lembaga rehabilitasi lainnya yang bekerja sama dengan BNN dibuktikan dengan adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : KEP/121/I/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 20 Januari 2023, telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga rehabilitasi pada Triwulan II sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Lembaga
1	BNN Kabupaten OKU Timur	Yayasan Bina Sriwijaya Persada

Adapun 3 target SNI Reguler lembaga rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : B/245/II/KA/RH.00.01/2023/BNNP tanggal 10 Februari 2023 adalah :

1. Klinik Pratama Praja Nugraha BNN Kota Prabumulih.
2. Klinik Pratama Ika Mandiri BNN Kabupaten Muara Enim.
- 3. Klinik Pratama BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.**

Berdasarkan Surat Deputi Rehabilitasi Nomor : B/50/I/DE/RH.02.03/2024/BNN, tanggal 09 Januari 2024, perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi SNI Target Reguler Tahun 2023 dinyatakan bahwa 3 Klinik Pratama target SNI Reguler tersebut di atas dinyatakan memenuhi SNI 8807:2022 dengan target pemenuhan 70 % s.d. 85 %.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di Kabupaten OKU Timur telah mencukupi dari target yang telah ditetapkan dengan target 2 Lembaga dan terealisasi sebesar 2 Lembaga dengan capaian target mencapai 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba;
2. Meningkatkan kompetensi petugas Rehabilitasi dalam layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba serta Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Faktor keberhasilan :

1. Keterbukaan informasi akan penyelenggaraan kegiatan dan peran aktif panitia dalam mensosialisasikannya ke lembaga rehabilitasi sehingga pemenuhan kuota peserta terpenuhi;
2. Adanya kesempatan kepada peserta untuk belajar mandiri maupun berkelompok pra uji kompetensi.

Faktor kegagalan :

1. Petugas rehabilitasi yang terampil sudah banyak yang tersertifikasi dalam uji kompetensi sebelumnya;
2. Adanya peserta yang tidak mampu ikut serta dalam kegiatan bimbingan teknis pra uji kompetensi karena keterbatasan jarak dan waktu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai Langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya layanan yang memadai dalam penanganan pecandu narkoba;
2. Melengkapi semua berkas kelengkapan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai agar terpenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

7.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi Narkotika
-----------	--

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, BNN Kabupaten OKU Timur telah melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan bagi lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi petugas lembaga rehabilitasi yang ada di OKU Timur.

Target dan realisasasi Indikator Kinerja yang ketujuh adalah sebagaimana tabel berikut ini :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional dari indikator unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya. Dan memiliki surat keterangan atau SK yang ditetapkan oleh Kelurahan/Desa.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran dilakukan dengan mendata jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang telah terbentuk berdasarkan surat atau SK dari desa/kelurahan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah telah mencukupi dari target yang telah ditetapkan dengan target 20 Unit dan terealisasi sebesar 20 Unit dengan capaian target mencapai 100%.

Adapun target BNN Kabupaten OKU Timur adalah 2 Unit IBM dan terealisasi 2 unit IBM (100%) dengan rincian sebagai berikut :

Terdapat 2 unit IBM operasional dengan rincian sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	BNN KABUPATEN OKU TMUR	2 Unit	2 Unit	1. Desa Gumawang 2. Desa Kotabaru Selatan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi yang baik antara BNNK dengan Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Lembaga rehabilitasi komponen Masyarakat.
2. Tersedianya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang lebih mendukung untuk operasional Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen Masyarakat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja.

Faktor Keberhasilan :

1. Adanya komitmen lembaga rehabilitasi untuk tetap memberikan layanan rehabilitasi baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat;
2. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara BNN dengan lembaga rehabilitasi mitra.

Faktor Kegagalan :

Faktor penghambat realisasi kinerja kegiatan yaitu minimnya kuantitas pelatihan untuk semua lembaga rehabilitasi yang dapat mendukung kerjasama antara BNN dan mitra.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti sertakan lembaga milik Instansi Pemerintah untuk berperan aktif mensosialisasikan tentang layanan rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat;
2. Tersedianya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang lebih mendukung untuk operasional klinik pratama.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Dalam meningkatkan persentase fasilitas layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan program rehabilitasi, BNN Kabupaten OKU Timur kesulitan untuk mendorong instansi pemerintah yang ada di Kabupaten OKU Timur. Sehingga mengakibatkan terbatasnya fasilitas rehabilitasi narkoba di Kabupaten OKU Timur.
2. Dalam meningkatkan penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah. Masih kurang seriusnya Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik untuk melakukan pemeriksaan awal dalam program rehabilitasi sehingga anggaran tidak dapat di serap semuanya.

Strategi kedepan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Memberikan dukungan dan mendorong instansi pemerintah yaitu rumah sakit umum dan puskesmas agar lebih pro aktif melaksanakan program rehabilitasi narkoba baik itu rawat jalan maupun rawat inap.
2. Segera mengkoordinasikan setiap kendala yang dihadapi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

8.	Sasaran : Meningkatnya kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika
-----------	---

Keberhasilan sasaran tersebut di atas diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan berikut ini:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4 Indeks	3,4 Indeks	100%

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional dari indikator ini adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat (klien, keluarga klien, dan masyarakat) yang mengakses layanan rehabilitasi.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran dilakukan melalui survei kepada klien, keluarga klien, dan masyarakat dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5342 – 3,532	76,61 – 88,30	A	Sangat Baik

Kegiatan ini dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh Klien (setelah mendapatkan minimal 3 kali layanan) melalui link <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/> yang langsung diolah oleh Deputi Rehabilitasi dan hasilnya dipublikasikan kepada masing masing satuan kerja sebagai bahan evaluasi per semester.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja.

Faktor Keberhasilan :

- Adanya partisipasi yang baik dari penerima layanan untuk mengisi survei;
- Petugas memberikan survei kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal telah mendapatkan 3 kali layanan;
- Hubungan yang baik telah terbina antara petugas dan penerima manfaat;
- Layanan yang diberikan kepada masyarakat cukup memuaskan sehingga nilai yang dicapai dalam survei adalah “Baik”.

Faktor Kegagalan :

- a. Masyarakat tidak memiliki alat komunikasi yang mendukung dalam pengisian survei (contoh; HP Android). Hal ini diantisipasi petugas dengan melakukan fasilitasi survey di tempat layanan;
- b. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk melakukan survey di tempat (laptop, komputer, HP dll) yang disediakan oleh Klinik Pratama BNN Kabupaten OKU Timur.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Mengikutsertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.

9.	Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
----	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara (P-21)	100%

Adapun pengukuran indikator jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap diukur menggunakan jumlah Laporan Kasus Narkoba (LKN) yang tersusun. Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap terealisasi 2 berkas dari target 1 berkas. Dengan demikian capaian target BNN Kabupaten OKU Timur pada kasJumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang p-21 adalah 100%.

Dari hasil rekapitulasi laporan informasi yang diterima, dari masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa 90% dari laporan informasi yang diterima tersebut menghasilkan laporan kasus narkoba.

DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN

Definisi Operasional indikator jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba yang P-21 adalah jumlah penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, dengan mengukur berkas

perkara tindak pidana narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21 Tahun 2023 dengan target 1 Berkas Perkara terealisasi sebesar 1 Berkas Perkara dengan capaian target mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja dari Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No	Indikator kinerja kegiatan	Target			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba yang P-21	0	1	1	0	2	1

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target Reproja 2024	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5:4x100)
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba yang P-21	0	1	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan baik berupa senjata api, kendaraan operasional maupun lainnya dalam kegiatan Pemetaan Jaringan;
2. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang Pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkoba kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peredaran gelap narkoba dan takut memberikan keterangan kepada petugas sehingga petugas masih harus menggunakan bantuan dari informan;
3. Ada beberapa faktor eksternal yang menghambat penyidik menyelesaikan Berkas Tahap 1 misalnya waktu penetapan hasil laboratorium uji narkoba yang lama.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja.

Faktor Keberhasilan :

Faktor pendukung pencapaian berkas dari BNN Kabupaten OKU Timur beserta jajaran pada tahun ini didukung oleh :

1. Adanya informasi yang valid dan peran serta masyarakat untuk memberi laporan baik secara langsung maupun SMS Center apabila terdapat peredaran gelap narkoba di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan;
2. Adanya kerjasama tim dengan instansi-instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan (Polres OKU Timur, Polres OKU, Polres OKU Selatan, BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNN Pusat), serta dalam proses penyidikan yaitu Kejaksaan dan Pengadilan dalam proses pemberkasan sampai P-21;
3. Tersedianya SDM penyidik di BNN Kabupaten OKU Timur dalam penyelesaian penyidikan hingga ke tahap P-21.

Faktor Kegagalan :

1. Setelah tahap I berkas perkara dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi (P-19);
2. Ada beberapa faktor eksternal yang menghambat penyidik menyelesaikan berkas Tahap 1 misalnya waktu penetapan hasil laboratorium uji narkoba yang lama.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Strategi kedepannya yang dapat dilakukan bidang pemberantasan untuk mencapai target yang semakin maksimal antara lain :

1. Menambah peralatan operasional dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak;
2. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba dan peningkatan SDM personil tim dan dibutuhkan penambahan personil, serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan;
3. Perlunya meningkatkan koordinasi agar tercipta sinergitas antara aparat pemerintah dalam wilayah kerja Kabupaten OKU Timur serta lebih memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat agar didapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkoba.

Pencapaian ini didukung oleh komitmen untuk memberantas narkoba dari seluruh personil dalam melaksanakan tugas dan personil bertindak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan. Jalinan koordinasi dengan instansi terkait yang harmonis juga menjadi faktor dalam keberhasilan ini.

Dalam pencapaian target, ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya personil dalam pemetaan dan penyelidikan serta kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kegiatan.

Strategi kedepannya yang dapat dilakukan bidang pemberantasan untuk mencapai target yang semakin maksimal antara lain meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di lapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target internasional, dan mengevaluasi dan mengintensifkasikan kerjasama yang telah terjalin selama ini.

10. Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	85,79 Indeks	97,15%

Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Capaian nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten OKU Timur didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan Efisiensi.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten OKU Timur diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan yaitu melalui sistem aplikasi SMART Kemenkeu.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran satker dengan pagu anggaran satker. Pengukuran konsistensi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan, membandingkan antara realisasi anggaran satker dan rencana penarikan dana bulanan satker dengan jumlah bulan. Pengukuran pencapaian keluaran dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan

rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran. Sedangkan pengukuran tingkat efisiensi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART Kemenkeu dengan target 86 terealisasi sebesar 85.79 dengan capaian target mencapai 99,76%.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 dapat terlihat di bawah ini :

Sumber Data : Smart Kemenkeu

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (%)
Penyerapan	98,79
Konsistensi	95,35
Capaian Rincian Output (CRO)	100
Efisiensi	1,51
Nilai Efisiensi	53,77
CAPAIAN SMART DJA	85.79

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No	Indikator kinerja kegiatan	Target			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai Kinerja Anggaran	90	88	86	87.33	85.48	85.79

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target Reproja 2024	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5:4x100)
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisiensi	Nilai Kinerja Anggaran	86	85.79	98,84

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 86 untuk Meningkatkan proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien, dapat terealisasi pada Tahun 2023 yaitu 85.79 dengan persentase capaian 98,84%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja.

Faktor Keberhasilan :

Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu;

Faktor Kegagalan :

1. Masih adanya timeline kegiatan yang meleset dari jadwal yang sudah direncanakan, sehingga berdampak kepada efisiensi waktu yang secara tidak langsung juga berdampak pada nilai efisiensi;
2. Belum tercapainya target dikarenakan juga karena kurangnya pemahaman aplikator mengenai teknis penginputan data khususnya capaian output pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan pantauan Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART Kemenkeu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pembina Fungsi BNN RI dan KPPN terkait kendala-kendala dalam penginputan pada aplikasi SMART Kemenkeu;
2. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana terkait capaian output per bulan sehingga bisa memaksimalkan capaian kinerja pada SMART Kemenkeu;
3. Melakukan evaluasi secara berkala sehingga permasalahan yang ditemui dapat segera ditindaklanjuti;
4. Mengikutkan ASN yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP dan BNNK.

11.	Sasaran : Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
------------	--

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten OKU Timur tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	97,09 Indeks	105,53

Capaian nilai IKPA BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi.

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

METODE PENGUKURAN

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator. Nilai IKPA tersebut dilihat dari beberapa indikator yang ada pada sistem aplikasi OM

SPAN, antara lain :

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran, Indikator : Revisi DIPA, dan Deviasi Halaman III DIPA;
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Indikator : Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM;
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, Indikator : Capaian Output.

Kategori Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Baik, apabila Nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ Nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ Nilai IKPA < 89 ;
- d. Kurang, apabila Nilai IKPA < 70 .

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini : Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 berdasarkan aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan target 92 terealisasi sebesar 97,09 (Sangat Baik) dengan capaian target mencapai 105,03%, rincian sebagai berikut:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL / KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	109	066	111079	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR	Nilai	100.00	89.47	93.87	0.00	0.00	99.51	100.00	100.00	77.67	80%	97.09	
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.95	18.77	0.00	0.00	9.95	5.00	25.00				
					Nilai Aspek								100.00				

Sumber Data : OMSPAN Kemenkeu

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya :

Perbandingan Capaian Kinerja dari Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No	Indikator kinerja kegiatan	Target			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	92	96,96	96,01	97,09

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja kegiatan	Target Reproja 2024	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 = (5:4x100)
1	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,19	97,09	99,90%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 97,19 untuk Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur, dapat terealisasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 97,09 dengan persentase capaian 99,90%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta belum adanya jabatan fungsional keuangan yang dapat memantau secara maksimal pelaksanaan anggaran;

2. Capaian output belum sesuai dengan realisasi anggaran, serta adanya penambahan output kegiatan di akhir tahun dikarenakan revisi anggaran sehingga butuh penjelasan dalam penjelasan pada laporan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja.

Faktor Keberhasilan :

Koordinasi yang baik antara tim pengelola keuangan BNN Kabupaten OKU Timur dengan rutin memantau pelaksanaan anggaran dan capaian indikator setiap bulannya, terutama Indikator Rencana Penarikan Dana dan Capaian output.

Faktor Kegagalan :

1. Masih adanya timeline kegiatan yang meleset dari jadwal yang sudah direncanakan, sehingga berdampak kepada Indikator Rencana Penarikan Dana oleh tim pengelola keuangan;
2. Belum maksimalnya pelaksana kegiatan dalam melaporkan capaian output kegiatan masing-masing Bagian/Bidang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pembina Fungsi BNN RI dan KPPN terkait kendala-kendala dalam pencapaian indikator IKPA pada OMSPAN Kemenkeu;
2. Mengevaluasi SOP terkait pelaksanaan anggaran;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana terkait timeline, rencana penarikan dana, capaian output per bulan agar konsisten dan komitmen dengan yang disampaikan sehingga bisa memaksimalkan capaian IKPA pada OMSPAN Kemenkeu setiap bulannya;
4. Melakukan evaluasi secara berkala sehingga permasalahan yang ditemui dapat segera ditindaklanjuti.

B. Realisasi Anggaran BNNK OKU Timur Tahun 2003

Tahun 2023 BNN Kota OKU TIMUR pada awal 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.544.257.000,- Tetapi Anggaran tersebut bertambah sampai engan akhir

tahun anggaran menjadi Rp. 1.566.577.000,- dikarenakan adanya penambahan permintaan layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba , dan Penambahan Belanja Modal Kearsipan dengan rincian realisasi keuangan sebagai berikut:

Dari indikator kinerja yang telah tersusun, maka dijadikan kegiatan dan besaran anggarannya dalam rangka mendukung P4GN di BNN Kabupaten Oku Timur sebagaimana tabel diatas dan dapat kami laporkan bahwa Bnn Kabupaten Oku Timur mendapat alokasi anggaran dari APBN Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.566.577.000,-**

Rincian dan realisasi Anggaran BNNK OKU Timur Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

SUMBER DANA	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
APBN	Belanja Barang	Rp. 1.546.577.000,-	Rp. 1.522.940.756,-	23.636.244,-	98.47%
	Belanja Modal	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	0,-	100%
TOTAL		Rp. 1.566.577.000,-	Rp. 1.542.940.756,-	23.636.244,-	98,49%

Berikut Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran BNN Kabupaten OKU Timur berdasarkan Kegiatan :

No	Indikator Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	Pembinaan adminisrasi dan pengelolaan keuangan	Rp. 111.212.000,-	Rp. 111.131.793,-	99,93%
2	Pengembangan organisasi, tatalaksana SDM	Rp. 16.992.000,-	Rp. 16.992.000,-	100%
3	Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN	Rp. 35.718.000,-	Rp. 34.418.682,-	99,16%
4	penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan pengelolaan sarana dan prasarana	Rp. 844.830.000,-	Rp. 843.806.281,-	99,88%
5	Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan	Rp. 20.000.000,-	Rp. 19.975.000,-	99,88%
6	Pengelolaan informasi dan edukasi	Rp. 74.000.000,-	Rp. 74.000.000,-	100%
7	Fasilitas dan pembinaan keluarga	Rp. 100.000.000,-	Rp. 98.880.000,-	98,88%

8	Pemberdayaan peran serta masyarakat	Rp. 189.405.000,-	Rp. 186.747.000,-	98,60%
9	Pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Rp. 4.065.000,-	Rp. 4.065.000,-	100%
10	Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah	Rp. 13.400.000,-	Rp. 10.215.000,-	76,23%
11	Fasilitas dan pembinaan lembaga	Rp. 106.955.000,-	Rp. 91.710.000,-	85,75%
12	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	100%
TOTAL		Rp. 1.566.577.000,-	Rp. 1.542.940.756	98,49%

Dari sisi pelaksanaan anggaran, BNN Kabupaten OKU Timur telah berpedoman pada rencana kerja program dan anggaran sesuai fungsi yang ada. Secara umum, penyerapan anggaran BNN Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan cukup baik, dengan persentase penyerapan sebesar **Rp. 1.542.940.756,- (Satu miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ratur lima puluh enam rupiah), atau sebesar 98,49%.**

Sebagai pembandingan pagu dan realisasi anggaran antara tahun sebelumnya maka dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2022 BNN Kabupaten OKU Timur mendapat sebaran pagu atau anggaran sebesar **Rp. 1.479.100.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 1.440.379.652,-** dengan persentase **97,38%** dengan Rincian dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023 :

Tahun 2022			Tahun 2023		
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Rp 1.479.100.000	Rp 1.440.379.652	97,38%	Rp 1.566.577.000	Rp 1.542.940.756	98,49%

Kinerja dan anggaran BNN Kabupaten OKU Timur pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2022. Pada tahun 2022 BNN Kabupaten OKU Timur mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp 1.479.100.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp.1.440.379.652,-** dengan persentase sebesar **97,38%**, mengalami kenaikan pagu

anggaran pada tahun 2023 sebesar **Rp.1.566.577.000,-** telah terealisasi sebesar **Rp.1.542.940.756,-** dengan persentase sebesar **98,49%**. Pada tahun 2023 terdapat anggaran yang tidak terserap secara maksimal **Rp.23.636.244,-** dari program P4GN meliputi seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan sebesar **Rp. 22.208.000,-** dan Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp. 1.428.244,-** namun secara umum hal tersebut tidak mengurangi capaian kinerja di BNN Kabupaten OKU Timur.

Program yang dijadikan sebagai outcome adalah Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang secara teknis dilaksanakan di seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, seksi Rehabilitasi dan seksi Pemberantasan dengan total anggaran sebesar **Rp. 537.825.000,-** telah terealisasi sebesar **Rp. 515.617.000,-** dan tersisa sebesar **Rp. 22.208.000,-** dengan persentase realisasi sebesar **98,87%**.

Secara umum dapat dilaporkan bahwa Pagu Anggaran yang diberikan kepada BNNK OKU Timur pada tahun 2023 sebesar **Rp. 1.566.577.000,-** (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Rujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan capaian anggaran dapat diukur dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp.1.542.940.756,-** (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar **98,49%**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Kabupaten OKU Timur Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten OKU Timur sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten OKU Timur telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan BNN Kabupaten OKU Timur selama Tahun 2023 mencapai 106,60% sedangkan tingkat capaian keuangan mencapai 98,46%. Adanya Automatic Adjustment Tahun 2023 tidak menjadi kendala dalam pengukuran dan pencapaian kinerja, kegiatan dan kinerja masih dapat dilaksanakan dengan anggaran yang terbatas meskipun adanya penyesuaian aktivitas/kegiatan dalam mencapai kinerja.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten OKU Timur, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen maupun peningkatan kemampuan dan keahlian personil untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/ monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial, ataupun media lain sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.

6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
7. Optimalisasi teknologi informasi dan memperbarui peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum yang terkait.
8. Penambahan sarana dan prasarana Bidang Pemberantasan seperti alat intelijen, senjata, dan perlengkapan lainnya sebagai penunjang pelaksanaan P4GN;
9. Koordinasi yang lebih intensif kepada Pembina Fungsi ataupun stakeholder terkait guna tercapainya target Indikator Kinerja Kegiatan di tahun selanjutnya.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oku Timur secara umum telah melaksanakan pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2023 sebagaimana laporan ini dan dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian output sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi 98,49%.
2. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja :
 - a. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas.
 - b. Peningkatan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
 - c. Optimalisasi pendidikan pelatihan bagi personil BNN Kabupaten Oku Timur.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
 - e. Membangun Tim Kerja yang solid disetiap Seksi dilingkungan BNN Kabupaten OKU Timur.
 - f. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base sebagai sarana Komunikasi, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Kinerja.

Demikian LKIP ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan gambaran secara utuh dan objektif terhadap pencapaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oku Timur Tahun 2023.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFRIYANTO TAMBUNAN, M.M.

**Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJOKO PRIHADI, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

DJOKO PRIHADI, S.H., M.H.

Magelang, 06 Februari 2023
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR**

EFRIYANTO TAMBUNAN, M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,10 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.74.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.189.405.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.13.400.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.104.635.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.4.065.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.50.000.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.111.212.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.16.992.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.35.718.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.824.830.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DJOKO PRIHADI, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

EFRIYANTO TAMBUNAN, M.M.

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - c. Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) T.A. 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI ACEH	50.06	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	49.07	Rendah
BNN KABUPATEN GAYO LUES	54.00	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	56.12	Sangat Tinggi
BNN KOTA SABANG	52.63	Tinggi
BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.40	Rendah
BNN KOTA LANGSA	52.56	Tinggi
BNN KABUPATEN BIREUEN	51.26	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	50.13	Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE	55.87	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDA ACEH	55.45	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI ACEH	52.41	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	55.56	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO	54.18	Sangat Tinggi
BNN KOTA BINJAI	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.47	Sangat Tinggi
BNN KOTA GUNUNGSITOLI	51.57	Tinggi
BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53.99	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LANGKAT	52.62	Tinggi
BNN KABUPATEN ASAHAN	54.66	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	54.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.01	Sangat Tinggi
BNN KOTA TEBING TINGGI	54.46	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	54.42	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.41	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA UTARA	54.07	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	48.41	Rendah
BNN KOTA SAWAHLUNTO	55.36	Sangat Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK	54.13	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.36	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT	52.52	Tinggi
BNN PROVINSI RIAU	54.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEKANBARU	53.53	Sangat Tinggi
BNN KOTA DUMAI	52.37	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI RIAU	53.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAMBI	41.57	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50.77	Tinggi
BNN KOTA JAMBI	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANGHARI	52.94	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI JAMBI	49.81	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	50.75	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN ILIR	50.07	Tinggi
BNN KOTA PAGARALAM	55.24	Sangat Tinggi
BNN KOTA LUBUKLINGGAU	52.11	Tinggi
BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	53.75	Sangat Tinggi
BNN KOTA PRABUMULIH	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	55.38	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	54.24	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	52.65	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SUMATERA SELATAN	53.13	Tinggi
BNN PROVINSI LAMPUNG	55.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.45	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.51	Sangat Tinggi
BNN KOTA METRO	47.68	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	45.02	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN	48.53	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI LAMPUNG	51.28	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.53	Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA	52.18	Tinggi
BNN KOTA PANGKAL PINANG	54.60	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BELITUNG	55.19	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	54.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANGKA BELITUNG	53.46	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.23	Tinggi
BNN KABUPATEN KARIMUN	55.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATAM	52.99	Tinggi
BNN KOTA TANJUNG PINANG	49.77	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KEPULAUAN RIAU	52.97	Tinggi
BNN PROVINSI BENGKULU	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA BENGKULU	53.46	Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53.80	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BENGKULU	53.77	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI DKI JAKARTA	52.68	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA SELATAN	44.28	Sangat Rendah
BNN KOTA JAKARTA TIMUR	52.22	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.01	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI DKI	49.55	Rendah

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
JAKARTA		
BNN PROVINSI BANTEN	40.71	Sangat Rendah
BNN KOTA TANGERANG SELATAN	50.85	Tinggi
BNN KOTA CILEGON	54.92	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANGERANG	55.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANTEN	50.46	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA BARAT	41.19	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BOGOR	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIANJUR	55.31	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDUNG	52.72	Tinggi
BNN KOTA CIREBON	54.10	Sangat Tinggi
BNN KOTA CIMAHI	56.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUKABUMI	44.65	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN GARUT	55.34	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUNINGAN	54.37	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIAMIS	52.53	Tinggi
BNN KOTA DEPOK	52.18	Tinggi
BNN KABUPATEN KARAWANG	52.99	Tinggi
BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.63	Sangat Tinggi
BNN KOTA TASIKMALAYA	52.16	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMEDANG	54.42	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA BARAT	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TENGAH	51.75	Tinggi
BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	52.67	Tinggi
BNN KOTA TEGAL	56.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANYUMAS	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CILACAP	54.98	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KENDAL	55.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANG	48.43	Rendah
BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.67	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH	53.44	Tinggi
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI DIY	55.51	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR	53.83	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN UTARA	51.71	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	53.49	Tinggi
BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	47.07	Rendah
BNN KOTA BITUNG	48.72	Rendah
BNN KOTA MANADO	53.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	54.59	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI UTARA	51.51	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.04	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	53.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MOROWALI	52.34	Tinggi
BNN KOTA PALU	47.49	Rendah
BNN KABUPATEN DONGGALA	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN POSO	52.59	Tinggi
BNN KABUPATEN TOJO UNA UNA	52.68	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGAH	50.85	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	55.44	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANA TORAJA	52.66	Tinggi
BNN KABUPATEN BONE	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA PALOPO	56.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI SELATAN	56.79	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	56.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUNA	53.68	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOLAKA	53.66	Sangat Tinggi
BNN KOTA KENDARI	50.76	Tinggi
BNN KOTA BAU-BAU	53.23	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGGARA	53.60	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	54.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	55.44	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI BARAT	55.11	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI MALUKU	52.19	Tinggi
BNN KABUPATEN BURU SELATAN	46.93	Rendah
BNN KOTA TUAL	54.89	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU	51.34	Tinggi
BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.68	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	52.76	Tinggi
BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	56.40	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	53.42	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU UTARA	52.06	Tinggi
BNN PROVINSI BALI	55.71	Sangat Tinggi
BNN KOTA DENPASAR	56.04	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BADUNG	56.57	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GIANYAR	52.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BULELENG	55.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	57.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARANGASEM	57.00	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BALI	55.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	54.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BIMA	50.28	Tinggi
BNN KOTA MATARAM	58.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	53.50	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA	51.88	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA BARAT	53.64	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BELU	56.20	Sangat Tinggi
BNN KOTA KUPANG	53.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA TIMUR	53.16	Tinggi
BNN PROVINSI GORONTALO	52.89	Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA	49.66	Rendah
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2023**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	73,482	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	90,893	SANGAT TINGGI
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	76,429	RENDAH
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	82,946	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	92,857	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	74,911	RENDAH
7	BNN KOTA LANGSA	72,500	RENDAH
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	95,000	SANGAT TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	86,607	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	74,107	RENDAH
11	BNN KOTA BANDA ACEH	87,232	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	81,875	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,339	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	87,500	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	79,911	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	81,339	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	95,089	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	83,661	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	77,143	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	84,554	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,589	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	93,750	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	89,732	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	73,482	RENDAH
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	86,071	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,875	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	85,000	TINGGI
28	BNNP SUMATERA BARAT	90,089	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	86,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	94,911	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	80,089	TINGGI
33	BNNP RIAU	91,429	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	93,304	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	70,804	RENDAH
36	BNN KOTA PEKANBARU	85,625	TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,696	TINGGI
38	BNNP JAMBI	87,232	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,161	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	92,232	SANGAT TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	83,125	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	84,375	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	86,875	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	79,464	TINGGI
45	BNN KOTA METRO	83,036	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	86,250	TINGGI
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	0	0
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	82,589	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	91,518	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,696	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	89,196	SANGAT TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	87,232	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82,946	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	81,339	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	71,875	RENDAH
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	79,286	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	86,786	TINGGI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	84,643	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	83,125	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	89,018	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,268	RENDAH
63	BNN KABUPATEN BANGKA	89,375	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	85,357	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,857	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75,982	RENDAH
67	BNNP BENGKULU	91,786	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	84,554	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	85,357	TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	87,500	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	83,482	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	87,500	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	78,036	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNNP BANTEN	85,089	TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	86,339	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,554	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	87,232	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,054	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	88,304	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	85,625	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	87,321	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	95,714	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	91,250	SANGAT TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	84,643	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	88,393	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	86,339	TINGGI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	78,125	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	85,804	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,321	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	88,571	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	81,875	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	82,054	TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAkan	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	87,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	85,536	TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,732	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	88,750	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	88,482	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	77,321	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,929	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,214	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNN KABUPATEN MUNA	89,911	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,429	TINGGI
176	BNN KOTA KENDARI	86,875	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	94,196	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	82,679	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	93,750	SANGAT TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,268	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	76,875	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	83,304	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	89,643	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	82,679	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	91,696	SANGAT TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	70,625	RENDAH
187	BNNP BALI	89,196	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	79,821	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	87,857	TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANJAR	95,536	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	91,607	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	89,821	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	84,018	TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	87,589	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	85,625	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	81,339	TINGGI
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	88,125	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	77,411	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	BNNP PAPUA	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	76,696	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2023		85,389	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/100/II/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2023 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari tiap BNNP dan BNNK, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2023

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP Aceh	3.25			3.27	3.26	Sangat Mandiri	A
2	BNNK Sabang	3.71			3.8	3.755	Sangat Mandiri	A
3	BNNK Pidie Jaya	3.34		3.72		3.53	Sangat Mandiri	A
4	BNNK Pidie	2.88		3.2		3.04	Mandiri	B
5	BNNK Gayo Lues			2.86	3.18	3.02	Mandiri	B
6	BNNK Bireuen	3.51			3.5	3.505	Sangat Mandiri	A
7	BNNK Banda Aceh	3.48			3.62	3.55	Sangat Mandiri	A
8	BNNK Aceh Tamiang	3.48			3.43	3.455	Sangat Mandiri	A
9	BNNK Aceh Selatan	3.33		3.28		3.305	Sangat Mandiri	A
10	BNN Kota Lhokseumawe	3.84			3	3.42	Sangat Mandiri	A
11	BNN Kota Langsa	3.53		3.4		3.465	Sangat Mandiri	A
12	BNNP Sumatera Barat	3.61			3.53	3.57	Sangat Mandiri	A
13	BNNK Solok			3.58	3.97	3.775	Sangat Mandiri	A
14	BNNK Sawahlunto	3.74		-	3.33	3.535	Sangat Mandiri	A
15	BNNK Payakumbuh	3.83		3.87		3.85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK Pasaman Barat	3.68		3.46		3.57	Sangat Mandiri	A
17	BNNP Sumatera Utara	3.36	3.53	-	-	3.45	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK Tb Tinggi	-	3.37	-	3.42	3.40	Sangat Mandiri	A
19	BNNK Tapanuli Selatan	3.768			3.6432	3.71	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. Balai			3.36	3.68	3.52	Sangat Mandiri	A
21	BNNK Simalungun	3.47	3.33			3.40	Sangat Mandiri	A
22	BNNK Serdang Bedagai	3.27	-	-	3.3	3.29	Sangat Mandiri	A
23	BNNK Pematang Siantar	3.4	3.414			3.41	Sangat Mandiri	A
24	BNNK Mandailing Natal	-	3.75	-	3.55	3.65	Sangat Mandiri	A
25	BNNK Langkat	3.28	3.33			3.31	Sangat Mandiri	A
26	BNNK Labuhan Batu Utara	3.2512		3.7456		3.50	Sangat Mandiri	A
27	BNNK Karo	3.57			3.45	3.51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK Gunungsitoli	3.52	-	-	3.44	3.48	Sangat Mandiri	A
29	BNNK Deli Serdang	3.76			3.68	3.72	Sangat Mandiri	A
30	BNNK Binjai	3.65	-	-	3.51	3.58	Sangat Mandiri	A
31	BNNK Batubara	3.72	-	-	3.48	3.6	Sangat Mandiri	A
32	BNNK Asahan	3.44			3.44	3.44	Sangat Mandiri	A
33	BNNP Sumatera Selatan	3.87			3.83	3.85	Sangat Mandiri	A
34	BNNK Prabumulih	3.74			4	3.87	Sangat Mandiri	A
35	BNNK Pagar Alam	3.52			3.52	3.52	Sangat Mandiri	A
36	BNNK Oku Timur	3.5			3.64	3.57	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
37	BNNK Ogan Komerling Ilir	3.75			3.82	3.785	Sangat Mandiri	A
38	BNNK Ogan Ilir	3.42			3.4	3.41	Sangat Mandiri	A
39	BNNK Muara Enim	3.6			3.63	3.615	Sangat Mandiri	A
40	BNNK Lubuklinggau			3.72	3.86	3.79	Sangat Mandiri	A
41	BNNK Empat Lawang	3.51			3.36	3.435	Sangat Mandiri	A
42	BNN Kab Musi Rawas		3.41	3.46		3.435	Sangat Mandiri	A
43	BNNP Lampung	3.32		3.68		3.5	Sangat Mandiri	A
44	BNNK Way Kanan	3.60			3.48	3.54	Sangat Mandiri	A
45	BNNK Tanggamus	3.68			3.68	3.68	Sangat Mandiri	A
46	BNNK Lampung Timur			3.56	3.64	3.6	Sangat Mandiri	A
47	BNNK Lampung Selatan	3.64			3.52	3.58	Sangat Mandiri	A
48	BNN Kota Metro	3.62		3.53		3.575	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3.74			3.62	3.68	Sangat Mandiri	A
50	BNNK Pelalawan	3.42			3.5	3.46	Sangat Mandiri	A
51	BNNK Pekan Baru	3.8	3.9	-	-	3.85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK Kuantan Singingi			3.72	3.78	3.75	Sangat Mandiri	A
53	BNN Kota Dumai	3.85	-	-	3.92	3.885	Sangat Mandiri	A
54	BNNP Kepulauan Riau		4		4	4	Sangat Mandiri	A
55	BNNK Tanjungpinang	3.52			3.57	3.5456	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 15 Januari 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
56	BNNK Karimun			4	4	4	Sangat Mandiri	A
57	BNN Kota Batam			3.93	3.78	3.855	Sangat Mandiri	A
58	BNNP Jambi	3.612	-	-	3.644	3.628	Sangat Mandiri	A
59	BNNK Tanjab Timur	-	3.296	2.912	-	3.104	Mandiri	B
60	BNN Kota Jambi	-	3.86	-	3.924	3.892	Sangat Mandiri	A
61	BNNK Batanghari	3.59			3.57	3.58	Sangat Mandiri	A
62	BNNP Bangka Belitung	3.28			3.34	3.31	Sangat Mandiri	A
63	BNNK Pangkalpinang			3.6	3.1	3.35	Sangat Mandiri	A
64	BNNK Belitung	3.6		-	3.5	3.55	Sangat Mandiri	A
65	BNNK Bangka selatan	3			3.4	3.2	Mandiri	B
66	BNNK Bangka			3.59	3.63	3.61	Sangat Mandiri	A
67	BNNP Bengkulu	3.51	-	-	3.73	3.62	Sangat Mandiri	A
68	BNNK Bengkulu Selatan	3.46		3.8		3.63	Sangat Mandiri	A
69	BNNK Bengkulu	3.45		3.33		3.39	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI Jakarta	3.33	3.21	-	-	3.27	Sangat Mandiri	A
71	BNNK Jakarta Selatan	3.31			3.12	3.215	Mandiri	B
72	BNN Kota Jakarta Utara		3.57		3.73	3.65	Sangat Mandiri	A
73	BNN Kota Jakarta Timur	2.81				2.81	Mandiri	B
74	BNNP Banten	3.54		3.72		3.63	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
75	BNNK Kota Tangerang Selatan			3.27	3.28	3.275	Sangat Mandiri	A
76	BNNK Kota Tangerang			3.25	3.25	3.25	Mandiri	B
77	BNNK Kota Cilegon		3.52		3.77	3.645	Sangat Mandiri	A
78	BNNP Jawa Barat	3.43	-	-	3.49	3.46	Sangat Mandiri	A
79	BNNK Sumedang	3.52			3.21	3.365	Sangat Mandiri	A
80	BNNK Sukabumi	3.83			3.81	3.82	Sangat Mandiri	A
81	BNNK Karawang	3.88	3.75			3.815	Sangat Mandiri	A
82	BNNK Garut		3.6		3.64	3.62	Sangat Mandiri	A
83	BNNK Cimahi			3.64	3.44	3.54	Sangat Mandiri	A
84	BNNK Cianjur	3.21			3.2	3.21	Mandiri	B
85	BNNK Ciamis	3.6			3.52	3.56	Sangat Mandiri	A
86	BNNK Bandung Barat			3.52	4.0	3.76	Sangat Mandiri	A
87	BNN Kota Tasikmalaya	3.43	3.48			3.455	Sangat Mandiri	A
88	BNN Kota Depok	3.6			3.39	3.50	Sangat Mandiri	A
89	BNN Kota Cirebon	2.56		2.64		2.6	Mandiri	B
90	BNN Kota Bandung		3.34		3.78	3.56	Sangat Mandiri	A
91	BNN Kabupaten Bogor			3.74	3.12	3.43	Sangat Mandiri	A
92	BNNK Kuningan	3.57			3.43	3.5	Sangat Mandiri	A
93	BNNP Jawa Tengah	3.52		3.44		3.48	Sangat Mandiri	A
NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM,00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
94	BNNK Temanggung			3,64	3,66	3,65	Sangat Mandiri	A
95	BNNK Tegal		3,28		3,3	3,29	Sangat Mandiri	A
96	BNNK Purbalingga	3,39			3,38	3,385	Sangat Mandiri	A
97	BNNK Magelang			3,52	3,48	3,5	Sangat Mandiri	A
98	BNNK Cilacap	3,49			3,36	3,425	Sangat Mandiri	A
99	BNNK Batang	3,32			3,32	3,32	Sangat Mandiri	A
100	BNNK Banyumas	3,52		3,64		3,58	Sangat Mandiri	A
101	BNN Kota Surakarta	3,37			3,47	3,42	Sangat Mandiri	A
102	BNN Kab Kendal	3,83			3,67	3,75	Sangat Mandiri	A
103	BNNP Jawa Timur	3,65			3,68	3,665	Sangat Mandiri	A
104	BNNK Tulung Agung	3,92		3,8		3,86	Sangat Mandiri	A
105	BNNK Tuban			3,6	3,47	3,535	Sangat Mandiri	A
106	BNNK Trenggalek	3,5			3,4	3,45	Sangat Mandiri	A
107	BNNK Sumenep	3,24			3,36	3,3	Sangat Mandiri	A
108	BNNK Sidoarjo	3,66		3,96		3,81	Sangat Mandiri	A
109	BNNK Pasuruan			3,69	3,78	3,735	Sangat Mandiri	A
110	BNNK Nganjuk			3,79	3,54	3,665	Sangat Mandiri	A
111	BNNK Mojokerto	3,26		3,36		3,31	Sangat Mandiri	A
112	BNN Kab Malang	3,69		3,71		3,7	Sangat Mandiri	A
113	BNNK Lumajang	3,04			3,56	3,3	Sangat Mandiri	A
114	BNNKab Kediri	3,3		3,34		3,32	Sangat Mandiri	A
115	BNNK Gresik	4			3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
116	BNNK Blitar	3,36			3,32	3,34	Sangat Mandiri	A
NO	SATKER	HASIL IKP			INDEKS	KATEGORI	MUTU	

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
117	BNN Kota Surabaya	3.28			3.27	3.275	Sangat Mandiri	A
118	BNN Kota Malang			3.39	3.42	3.405	Sangat Mandiri	A
119	BNN Kota Kediri	3.88		3.72		3.8	Sangat Mandiri	A
120	BNN Kota Batu	3.6			3.48	3.54	Sangat Mandiri	A
121	BNNP D.I. Yogyakarta			3.6	3.44	3.52	Sangat Mandiri	A
122	BNNK Sleman			3.51	3.45	3.48	Sangat Mandiri	A
123	BNNK Bantul			3.35	3.47	3.41	Sangat Mandiri	A
124	BNN Kota Yogyakarta			3.37	3.43	3.4	Sangat Mandiri	A
125	BNNP Bali	3.85		3.64		3.745	Sangat Mandiri	A
126	BNNK Klungkung			3.69	3.72	3.705	Sangat Mandiri	A
127	BNNK Karangasem	3.2		3.4		3.3	Sangat Mandiri	A
128	BNNK Gianyar	3.68	3			3.34	Sangat Mandiri	A
129	BNN Kota Denpasar	3.2			3.2	3.2	Mandiri	B
130	BNN Kabupaten Badung			3.87	3.65	3.76	Sangat Mandiri	A
131	BNN Kab Buleleng	3.33			3.36	3.345	Sangat Mandiri	A
132	BNNP NTB	3.36		3.25		3.305	Sangat Mandiri	A
133	BNNK Sumbawa Barat	3.25			3.25	3.25	Mandiri	B
134	BNNK Sumbawa	3.66			3.32	3.49	Sangat Mandiri	A
135	BNNK Mataram	3.76			3.68	3.72	Sangat Mandiri	A
136	BNNK Bima	3.32		3.3		3.31	Sangat Mandiri	A
NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

137	BNNP NTT			3,42	3,44	3,43	Sangat Mandiri	A
138	BNNK Kota Kupang	3.40			3,66	3,53	Sangat Mandiri	A
139	BNNK Belu			3,4	3,56	3,48	Sangat Mandiri	A
140	BNN Kab. Rote Ndao			3,4	3,27	3,34	Sangat Mandiri	A
141	BNNP Kalimantan Barat		3.48	3.3		3.39	Sangat Mandiri	A
142	BNNK Sintang			3,08	3,69	3,385	Sangat Mandiri	A
143	BNNK Sanggau	3.92			3,98	3,95	Sangat Mandiri	A
144	BNNK Pontianak	3.58			3,86	3,72	Sangat Mandiri	A
145	BNNK Mempawah			3,37	3,32	3,35	Sangat Mandiri	A
146	BNN Kota Singkawang	3.56			3,55	3,555	Sangat Mandiri	A
147	BNN Kab. Kubu Raya			3,48	3,51	3,495	Sangat Mandiri	A
148	BNN Kab Bengkayang	3.18			3,57	3,375	Sangat Mandiri	A
149	BNNP Kalimantan Selatan	3.56		3,02		3,29	Sangat Mandiri	A
150	BNNK Tanah Laut			3,42	3,38	3,4	Sangat Mandiri	A
151	BNNK Tabalong			3,38	3,33	3,36	Sangat Mandiri	A
152	BNNK Hulu Sungai Utara	3.28		3,29		3,29	Sangat Mandiri	A
153	BNNK Hulu sungai Selatan			3,66	3,62	3,64	Sangat Mandiri	A
154	BNNK Barito Kuala	3.84		3,84		3,84	Sangat Mandiri	A
155	BNNK Banjarmasin	3.72			3,42	3,57	Sangat Mandiri	A
156	BNNK Banjarbaru			3,44	3,92	3,68	Sangat Mandiri	A
NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

157	BNNK Balangan			3,33	3,35	3,34	Sangat Mandiri	A
158	BNNP Kalimantan Tengah	3,76			3,64	3,7	Sangat Mandiri	A
159	BNNK Palangka Raya	3,44			3,44	3,44	Sangat Mandiri	A
160	BNNK Kotawaringin Barat	4			3,96	3,98	Sangat Mandiri	A
161	BNNP Kalimantan Timur	3,52		3,6		3,56	Sangat Mandiri	A
162	BNNK Samarinda	3,9		3,75		3,825	Sangat Mandiri	A
163	BNNK Balikpapan		3,59	3,52		3,555	Sangat Mandiri	A
164	BNN Kota Bontang			3,736	3,57	3,653	Sangat Mandiri	A
165	BNNP Kalimantan Utara			3,63		3,63	Sangat Mandiri	A
166	BNNK Tarakan	3,29			3,3	3,295	Sangat Mandiri	A
167	BNNK Nunukan	3,27			3,29	3,28	Sangat Mandiri	A
168	BNNP Sulawesi Barat			3,21	3,29	3,25	Mandiri	B
169	BNNK Polewali Mandar	3,38			3,8	3,59	Sangat Mandiri	A
170	BNNP Sulawesi Tenggara	3,22			3,34	3,28	Sangat Mandiri	A
171	BNNK Kolaka	4			3,5	3,75	Sangat Mandiri	A
172	BNNK Bau Bau	3,89			3,73	3,81	Sangat Mandiri	A
173	BNN Kota Kendari			3,42	3,53	3,475	Sangat Mandiri	A
174	BNNK Muna	3,78			3,67	3,725	Sangat Mandiri	A
NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

175	BNNP Sulawesi Selatan	3,27		3,19		3,23	Mandiri	B
176	BNN Kota Palopo	3,42			3,81	3,615	Sangat Mandiri	A
177	BNNK Tana Toraja			3,87	3,91	3,89	Sangat Mandiri	A
178	BNNK Bone	3,5		3		3,25	Mandiri	B
179	BNNP Sulawesi Tengah	3,21		3,32		3,265	Sangat Mandiri	A
180	BNNK Palu	3,28			3,53	3,405	Sangat Mandiri	A
181	BNNK Donggala	3,35			3,69	3,52	Sangat Mandiri	A
182	BNNK Banggai Kep	3,34			3,92	3,63	Sangat Mandiri	A
183	BNN Kab. Tojo Una-Una	3,38			3,40	3,390	Sangat Mandiri	A
184	BNN Kab Poso	3,48			3,64	3,56	Sangat Mandiri	A
185	BNN Kab. Morowali	3,88			3,2	3,54	Sangat Mandiri	A
186	BNNP Sulawesi Utara	2,83			3,64	3,235	Mandiri	B
187	BNNK Bolaang Mongondow			3,04	2,54	2,79	Mandiri	B
188	BNN Kota Bitung	3,35			3,21	3,28	Sangat Mandiri	A
189	BNN Kota Manado	3,17			3,16	3,165	Mandiri	B
190	BNNK Kepulauan Sangihe	3,4			3,4	3,4	Sangat Mandiri	A
191	BNNP Gorontalo	3,32			3,29	3,305	Sangat Mandiri	A
192	BNN Kota Gorontalo	3,27			3,5	3,385	Sangat Mandiri	A
193	BNNK Bone Bolango		3,74		3,45	3,595	Sangat Mandiri	A
NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
194	BNN Kab Gorontalo	3,72		3,34		3,53	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 15 Januari 2024

195	BNNK Gorontalo Utara	3,46		3,63		3,55	Sangat Mandiri	A
196	BNNK Boalemo			3,08	3,32	3,2	Mandiri	B
197	BNNP Maluku			3,57	3,6	3,585	Sangat Mandiri	A
198	BNNK Tual	3,8			3,2	3,5	Sangat Mandiri	A
199	BNNK Buru Selatan		3,24	3,84		3,54	Sangat Mandiri	A
200	BNNP Maluku Utara	3,62		3,44		3,53	Sangat Mandiri	A
201	BNNK Pulau Morotai	3,2		3,68		3,44	Sangat Mandiri	A
202	BNNK Halmahera Utara	3,2			3,12	3,16	Mandiri	B
203	BNN Kota Tidore Kepulauan	3,32		3,28		3,3	Sangat Mandiri	A
204	BNNP Papua	3,19			3,23	3,21	Mandiri	B
205	BNNK Mimika	3,23			3,23	3,23	Mandiri	B
206	BNNK Jayapura	3,14			3,29	3,22	Mandiri	B
207	BNNP Papua Barat	3,5			3,17	3,335	Sangat Mandiri	A
Nilai akhir IKP Tahun 2023		3,49	3,5	3,49	3,51	3,5	Sangat Mandiri	A

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4717/XII/DE/PM/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks KOTAN
Tahun 2023

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

/4. Demikian

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA TAHUN 2023

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aceh	1,88	3,05	2,72	2,70	2,82	2,60	Cukup Tanggap	C
2	Gayo Lues	1,81	3,53	2,99	3,54	3,70	3,07	Tanggap	B
3	Aceh Selatan	1,82	3,51	3,01	3,20	3,48	2,95	Tanggap	B
4	Pidie	1,73	2,93	2,47	2,69	2,91	2,52	Cukup Tanggap	C
5	Pidie Jaya	1,76	3,33	2,87	2,88	3,42	2,79	Tanggap	B
6	Aceh Tamiang	1,86	2,86	2,35	2,43	2,56	2,41	Cukup Tanggap	C
7	Bireuen	1,97	3,55	3,26	3,30	3,70	3,09	Tanggap	B
8	Kota Sabang	2,07	3,19	2,89	3,00	3,05	2,81	Tanggap	B
9	Kota Lhokseumawe	2,00	3,00	2,62	2,76	3,01	2,65	Tanggap	B
10	Kota Langsa	1,98	3,50	3,17	3,39	3,32	3,03	Tanggap	B
11	Banda Aceh	1,80	2,96	2,23	2,42	2,41	2,38	Cukup Tanggap	C
12	Sumatera Utara	2,23	3,42	3,02	3,33	3,30	3,04	Tanggap	B
13	Mandailing Natal	1,72	3,02	2,27	2,60	3,29	2,56	Cukup Tanggap	C
14	Deli Serdang	2,12	3,23	2,73	2,89	2,90	2,77	Tanggap	B
15	Simalungun	2,13	3,49	3,15	3,46	3,49	3,11	Tanggap	B
16	Serdang Bedagai	2,46	3,65	3,48	3,72	3,45	3,32	Sangat Tanggap	A
17	Kota Pematang Siantar	2,68	3,67	3,30	3,78	3,10	3,33	Sangat Tanggap	A
18	Kota Asahan	1,95	3,37	3,01	3,56	3,78	3,09	Tanggap	B
19	Kota Tebing Tinggi	2,43	3,31	2,76	2,83	3,10	2,88	Tanggap	B
20	Kota Tanjungbalai	2,57	3,53	3,00	3,33	3,40	3,17	Tanggap	B

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel							Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
21	Tapanuli Selatan	1,90	3,39	2,88	3,44	3,05	2,93	Tanggap	B		
22	Kota Binjai	2,08	3,11	2,93	3,16	3,24	2,87	Tanggap	B		
23	Langkat	2,50	3,61	3,23	3,56	3,52	3,27	Sangat Tanggap	A		
24	Kota Gunung Sitoli	1,99	3,03	2,59	2,76	2,84	2,63	Cukup Tanggap	C		
25	Labuhanbatu Utara	2,16	3,52	3,15	3,56	3,71	3,18	Tanggap	B		
27	Karo	2,11	3,39	3,12	3,49	3,32	3,06	Tanggap	B		
27	Batu Bara	2,52	3,72	3,51	3,64	3,36	3,33	Sangat Tanggap	A		
28	Sumatera Barat	2,19	3,34	3,02	3,26	3,31	3,00	Tanggap	B		
29	Kota Payakumbuh	2,32	3,84	3,46	3,88	3,93	3,44	Sangat Tanggap	A		
30	Kota Sawahlunto	1,72	3,05	2,63	2,85	3,06	2,63	Cukup Tanggap	C		
31	Pasaman Barat	2,93	3,36	3,31	3,51	3,30	3,27	Sangat Tanggap	A		
32	Solok	1,85	3,13	2,60	2,78	2,95	2,64	Cukup Tanggap	C		
33	Sumatera Selatan	2,00	3,15	2,71	2,88	3,01	2,73	Tanggap	B		
34	Kota Pagar Alam	1,86	3,02	2,47	2,46	2,87	2,51	Cukup Tanggap	C		
35	Kota Lubuklinggau	1,79	3,10	2,74	2,88	3,05	2,68	Tanggap	B		
36	Prabumulih	1,80	3,09	2,46	2,59	2,66	2,52	Cukup Tanggap	C		
37	Ogan Ilir	1,78	3,20	2,55	2,95	3,20	2,72	Tanggap	B		
38	Ogan Komering Ilir	1,91	3,33	3,01	3,34	3,29	2,94	Tanggap	B		
39	Empat Lawang	2,50	3,61	3,34	3,61	3,61	3,31	Sangat Tanggap	A		
40	Muara Enim	2,38	3,13	2,82	2,93	3,14	2,86	Tanggap	B		
41	Musi Rawas	1,90	2,83	2,40	2,43	2,56	2,42	Cukup Tanggap	C		
42	Ogan Komering Ulu Timur	2,06	3,11	2,80	2,98	3,05	2,78	Tanggap	B		
43	Bengkulu	1,89	3,03	2,57	2,72	2,82	2,59	Cukup Tanggap	C		
44	Bengkulu Selatan	2,03	3,24	2,88	3,06	3,01	2,82	Tanggap	B		
45	Kota Bengkulu	1,78	2,84	2,32	2,42	2,64	2,39	Cukup Tanggap	C		

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel							Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
46	Jambi	2,06	3,27	2,83	3,05	3,10	2,84	Tanggap	B		
47	Batang Hari	2,18	3,43	3,12	3,17	3,24	2,99	Tanggap	B		
48	Tanjung Jabung Timur	1,86	2,98	2,60	2,76	2,91	2,60	Cukup Tanggap	C		
49	Kota Jambi	2,13	3,30	2,65	3,16	3,04	2,87	Tanggap	B		
50	Riau	2,01	3,33	3,00	3,34	3,38	2,97	Tanggap	B		
51	Kota Dumai	2,04	3,57	3,56	3,65	3,72	3,23	Tanggap	B		
52	Kota Pekanbaru	2,12	3,21	2,59	3,48	3,24	2,95	Tanggap	B		
53	Pelalawan	1,95	3,47	3,10	3,52	3,65	3,09	Tanggap	B		
54	Kuantan Sengingi	1,94	3,08	2,77	2,75	2,97	2,66	Tanggap	B		
55	Kepulauan Riau	2,14	3,61	3,21	3,58	3,58	3,19	Tanggap	B		
56	Karimun	2,35	3,71	3,42	3,72	3,72	3,35	Sangat Tanggap	A		
57	Kota Batam	2,17	3,56	3,40	3,66	3,72	3,25	Tanggap	B		
58	Tanjung Pinang	1,96	3,55	2,85	3,37	3,31	3,00	Tanggap	B		
59	Bangka Belitung	1,97	3,33	2,98	3,23	3,26	2,92	Tanggap	B		
60	Bangka Selatan	1,78	2,99	2,60	2,73	3,01	2,59	Cukup Tanggap	C		
61	Bangka	2,01	3,39	3,17	3,52	3,40	3,06	Tanggap	B		
62	Kota Pangkalpinang	1,88	3,34	2,86	3,04	3,11	2,82	Tanggap	B		
63	Belitung	2,18	3,51	3,08	3,39	3,35	3,08	Tanggap	B		
64	Lampung	1,93	3,24	2,76	3,09	3,15	2,81	Tanggap	B		
65	Tanggamus	1,89	3,26	2,78	3,05	2,89	2,76	Tanggap	B		
66	Lampung selatan	2,17	3,77	3,33	3,78	3,82	3,34	Sangat Tanggap	A		
67	Kota Metro	1,92	3,15	2,63	2,75	3,02	2,67	Tanggap	B		
68	Way Kanan	1,82	2,89	2,37	2,90	2,87	2,57	Cukup Tanggap	C		
69	Lampung Timur	1,73	2,74	2,38	2,44	3,17	2,44	Cukup Tanggap	C		
70	Banten	2,18	3,39	3,08	3,41	3,39	3,06	Tanggap	B		

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel							Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha- n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
71	Kota Tangerang Selatan	2,98	3,66	3,59	3,77	3,76	3,52	Sangat Tanggap	A		
72	Kota Cilegon	1,79	2,99	2,49	2,81	2,57	2,53	Cukup Tanggap	C		
73	Kota Tangerang	1,99	3,57	3,20	3,71	3,74	3,20	Tanggap	B		
74	DKI Jakarta	1,84	3,03	2,50	2,57	2,94	2,55	Cukup Tanggap	C		
75	Kota Jakarta Timur	1,76	2,70	2,19	2,31	2,59	2,30	Cukup Tanggap	C		
76	Kota Jakarta Selatan	1,90	3,03	2,55	2,55	2,89	2,56	Cukup Tanggap	C		
77	Kota Jakarta Utara	1,74	3,25	2,63	2,80	3,23	2,70	Tanggap	B		
78	Jawa Barat	1,97	3,34	2,80	3,14	3,23	2,88	Tanggap	B		
79	Karawang	1,79	3,07	2,53	2,59	2,98	2,56	Cukup Tanggap	C		
80	Sukabumi	1,82	3,30	2,84	3,05	3,08	2,79	Tanggap	B		
81	Bogor	2,39	3,27	2,88	3,16	3,31	2,99	Tanggap	B		
82	Sumedang	1,93	3,13	2,58	2,66	3,04	2,65	Cukup Tanggap	C		
83	Tasikmalaya	2,00	3,38	2,76	3,24	3,30	2,92	Tanggap	B		
84	Ciamis	1,73	3,02	2,29	2,46	2,65	2,43	Cukup Tanggap	C		
85	Kuningan	1,95	3,33	2,66	3,02	2,96	2,78	Tanggap	B		
86	Kota Cirebon	1,77	3,10	2,54	2,76	3,18	2,64	Cukup Tanggap	C		
87	Kota Depok	1,91	3,59	3,00	3,73	3,72	3,17	Tanggap	B		
88	Cianjur	1,60	3,40	2,95	3,44	3,14	2,87	Tanggap	B		
89	Garut	2,32	3,52	3,15	3,82	3,63	3,27	Sangat Tanggap	A		
90	Kota Bandung	2,13	3,44	2,75	3,14	3,41	2,96	Tanggap	B		
91	Kota Cimahi	2,10	3,89	3,51	3,93	3,93	3,42	Sangat Tanggap	A		
92	Bandung Barat	1,95	2,90	2,23	2,42	2,57	2,43	Cukup Tanggap	C		
93	DI Yogyakarta	2,03	3,20	2,57	2,92	2,80	2,71	Tanggap	B		
94	Kota Yogyakarta	1,94	3,26	2,45	2,88	2,89	2,70	Tanggap	B		

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel								Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha- n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
95	Bantul	1,95	3,14	2,55	2,78	2,73	2,63	Cukup Tanggap	C			
96	Sleman	2,16	3,19	2,74	3,12	2,78	2,81	Tanggap	B			
97	Jawa Tengah	2,11	3,49	3,14	3,55	3,40	3,11	Tanggap	B			
98	Kendal	1,76	3,11	2,58	2,75	2,86	2,59	Cukup Tanggap	C			
99	Temanggung	2,24	3,63	3,28	3,81	3,38	3,25	Sangat Tanggap	A			
100	Banyumas	2,20	3,53	3,33	3,72	3,61	3,23	Tanggap	B			
101	Purbalingga	2,21	3,41	3,16	3,66	3,37	3,14	Tanggap	B			
102	Batang	2,26	3,52	3,19	3,86	3,36	3,24	Tanggap	B			
103	Cilacap	2,32	3,59	3,25	3,79	3,46	3,27	Sangat Tanggap	A			
104	Magelang	2,12	3,90	3,59	3,90	3,97	3,43	Sangat Tanggap	A			
105	Kota Surakarta	1,81	3,28	2,68	2,97	3,02	2,74	Tanggap	B			
106	Kota Tegal	2,13	3,51	3,25	3,70	3,77	3,23	Tanggap	B			
107	Jawa Timur	2,06	3,57	3,12	3,47	3,42	3,10	Tanggap	B			
108	Malang	2,31	3,74	3,23	3,58	3,49	3,25	Sangat Tanggap	A			
109	Tulungagung	1,97	3,53	3,07	3,47	3,50	3,07	Tanggap	B			
110	Pasuruan	2,10	3,67	3,25	3,64	3,53	3,21	Tanggap	B			
111	Sumenep	1,96	3,67	3,50	3,85	3,90	3,31	Sangat Tanggap	A			
112	Gresik	2,03	3,51	3,10	3,40	3,41	3,06	Tanggap	B			
113	Lumajang	2,15	3,40	2,93	3,11	3,38	2,96	Tanggap	B			
114	Kediri	1,84	3,32	2,68	3,16	2,77	2,76	Tanggap	B			
115	Tuban	2,08	3,47	3,01	3,38	3,54	3,06	Tanggap	B			
116	Kota Malang	1,84	3,30	2,87	3,10	3,14	2,82	Tanggap	B			
117	Kota Surabaya	2,17	3,42	2,97	3,25	3,14	2,98	Tanggap	B			
118	Kota Kediri	2,14	3,79	3,38	3,72	3,73	3,31	Sangat Tanggap	A			
119	Sidoarjo	2,00	3,63	3,02	3,62	3,68	3,17	Tanggap	B			
120	Kota Batu	2,14	3,41	2,88	3,13	2,71	2,87	Tanggap	B			

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel								Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha- n Kelu- arga	Ketahan- an Masya- rakat	Kewilaya- ha n	Kelembaga- an	Hukum						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
121	Trenggalek	2,14	3,71	3,17	3,67	3,67	3,25	Tanggap	B			
122	Nganjuk	2,16	3,70	3,24	3,63	3,62	3,24	Tanggap	B			
123	Kota Mojokerto	2,02	3,56	3,18	3,52	3,25	3,08	Tanggap	B			
124	Blitar	2,05	3,77	3,49	3,72	3,62	3,28	Sangat Tanggap	A			
125	Bali	1,98	3,30	2,75	3,01	3,14	2,82	Tanggap	B			
126	Badung	2,04	3,36	2,82	3,17	3,11	2,89	Tanggap	B			
127	Gianyar	2,00	3,35	2,73	3,09	3,48	2,91	Tanggap	B			
128	Klungkung	1,72	2,72	2,20	2,44	2,61	2,33	Cukup Tanggap	C			
129	Buleleng	2,20	3,55	3,02	3,13	3,23	3,01	Tanggap	B			
130	Karangasem	1,95	3,13	2,43	2,82	2,90	2,65	Tanggap	B			
131	Kota Denpasar	1,94	3,35	2,93	3,28	3,30	2,93	Tanggap	B			
132	NTT	2,09	2,98	2,47	2,58	2,54	2,54	Cukup Tanggap	C			
133	Kota Kupang	2,13	2,85	2,34	2,41	2,49	2,45	Cukup Tanggap	C			
134	Belu	2,18	3,09	2,85	2,86	2,70	2,72	Tanggap	B			
135	Rote Ndao	1,97	3,02	2,38	2,57	2,50	2,50	Cukup Tanggap	C			
136	NTB	2,02	3,25	2,71	2,88	3,00	2,76	Tanggap	B			
137	Sumbawa Barat	1,90	2,96	2,59	2,61	2,96	2,57	Cukup Tanggap	C			
138	Bima	2,11	3,11	2,50	2,53	2,73	2,60	Cukup Tanggap	C			
139	Mataram	2,31	3,87	3,14	3,80	3,31	3,30	Sangat Tanggap	A			
140	Sumbawa	1,85	3,15	2,68	2,78	3,11	2,68	Tanggap	B			
141	Kalimantan Selatan	1,98	3,40	2,99	3,25	3,28	2,95	Tanggap	B			
142	Barito Kuala	1,94	3,88	3,47	3,89	3,75	3,33	Sangat Tanggap	A			
143	Kota Banjarbaru	2,11	3,40	3,02	3,28	2,91	2,94	Tanggap	B			
144	Balangan	1,94	3,35	2,95	3,30	3,52	2,97	Tanggap	B			
145	Tanah Laut	2,13	3,37	3,08	3,30	3,47	3,03	Tanggap	B			

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel							Indeks	Kategori	Mutu
		Ketaha- n Kelu- arga	Ketahan- an Masya- rakat	Kewilaya- ha n	Kelembaga- an	Hukum					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
146	Tabalong	1,75	3,29	2,86	2,95	3,35	2,79	Tanggap	B		
147	Hulu Sungai Selatan	1,76	3,09	2,64	2,79	2,86	2,60	Cukup Tanggap	C		
148	Hulu Sungai Utara	2,10	3,72	3,12	3,71	3,68	3,24	Tanggap	B		
149	Kota Banjarmasin	2,13	3,31	2,90	3,04	3,36	2,91	Tanggap	B		
150	Kalimantan Barat	2,02	3,20	2,73	2,96	3,06	2,78	Tanggap	B		
151	Bengkayang	1,73	3,16	2,51	2,91	2,89	2,63	Cukup Tanggap	C		
152	Kubu Raya	1,99	3,41	3,09	3,41	3,50	3,03	Tanggap	B		
153	Sintang	2,25	3,43	3,03	3,18	3,39	3,03	Tanggap	B		
154	Sanggau	2,10	3,08	2,51	2,52	2,95	2,62	Cukup Tanggap	C		
155	Kota Singkawang	1,98	2,83	2,58	2,53	2,62	2,49	Cukup Tanggap	C		
156	Kota Pontianak	2,01	3,13	2,52	2,84	2,82	2,67	Tanggap	B		
157	Mempawah	2,10	3,51	3,01	3,52	3,48	3,11	Tanggap	B		
158	Kalimantan Timur	2,37	3,44	2,92	3,27	3,51	3,09	Tanggap	B		
159	Samarinda	1,99	3,30	2,53	3,05	3,41	2,85	Tanggap	B		
160	Balikpapan	2,02	3,44	2,94	3,22	3,56	3,00	Tanggap	B		
161	Bontang	2,90	3,55	3,24	3,49	3,57	3,34	Sangat Tanggap	A		
162	Kalimantan Tengah	2,40	3,59	3,23	3,45	3,58	3,22	Tanggap	B		
163	Kotawaringin Barat	2,51	3,91	3,82	3,98	3,98	3,58	Sangat Tanggap	A		
164	Kota Palangka Raya	2,31	3,35	2,84	3,06	3,29	2,96	Tanggap	B		
165	Kalimantan Utara	1,75	3,03	2,79	2,78	3,02	2,62	Cukup Tanggap	C		
166	Kota Tarakan	1,73	3,07	2,81	3,00	3,10	2,70	Tanggap	B		
167	Nunukan	1,78	2,99	2,76	2,52	2,95	2,54	Cukup Tanggap	C		
168	Sulawesi Selatan	1,94	3,35	3,00	3,26	3,23	2,92	Tanggap	B		
169	Tana Toraja	2,26	3,55	3,03	3,30	3,27	3,07	Tanggap	B		

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel							Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
170	Bone	1,81	3,26	3,09	3,21	3,39	2,89	Tanggap	B		
171	Kota Palopo	1,83	3,30	2,81	3,32	2,86	2,82	Tanggap	B		
172	Sulawesi Tengah	1,89	3,04	2,64	2,68	2,86	2,59	Cukup Tanggap	C		
173	Banggai Kepulauan	1,86	3,16	2,70	2,83	2,92	2,67	Tanggap	B		
174	Poso	1,82	2,86	2,56	2,45	2,59	2,43	Cukup Tanggap	C		
175	Tojo Una-Una	1,88	3,04	2,62	2,62	2,63	2,54	Cukup Tanggap	C		
176	Kota Palu	1,81	2,87	2,50	2,62	2,94	2,52	Cukup Tanggap	C		
177	Morowali	1,95	3,33	3,07	3,06	3,34	2,89	Tanggap	B		
178	Donggala	2,02	3,06	2,50	2,58	2,88	2,60	Cukup Tanggap	C		
179	Sulawesi Tenggara	2,04	3,10	2,61	2,82	3,02	2,70	Tanggap	B		
180	Muna	1,96	2,98	2,47	2,61	2,99	2,58	Cukup Tanggap	C		
181	Kolaka	2,13	3,09	2,55	2,66	2,81	2,65	Cukup Tanggap	C		
182	Kota Kendari	2,03	2,89	2,36	2,43	2,84	2,50	Cukup Tanggap	C		
183	Kota Bau-Bau	2,06	3,44	3,01	3,51	3,38	3,06	Tanggap	B		
184	Gorontalo	2,04	3,29	2,71	3,04	3,06	2,82	Tanggap	B		
185	Boalemo	2,07	3,24	2,94	2,98	3,13	2,84	Tanggap	B		
186	Bone Bolango	1,78	2,95	2,39	2,58	2,92	2,50	Cukup Tanggap	C		
187	Kota Gorontalo	2,06	3,10	2,56	2,75	2,81	2,66	Tanggap	B		
188	Gorontalo Utara	2,24	3,72	2,93	3,72	3,46	3,23	Tanggap	B		
189	Gorontalo	1,85	3,08	2,57	2,66	2,70	2,56	Cukup Tanggap	C		
190	Maluku	2,12	2,95	2,59	2,87	2,82	2,67	Tanggap	B		
191	Buru Selatan	2,26	3,29	2,88	3,46	3,02	3,00	Tanggap	B		
192	Kota Tual	2,01	2,65	2,34	2,36	2,63	2,38	Cukup Tanggap	C		
193	Maluku Utara	1,99	2,93	2,60	2,66	2,64	2,55	Cukup Tanggap	C		
194	Pulau Morotai	2,00	3,00	2,58	2,62	2,65	2,56	Cukup Tanggap	C		
195	Halmahera Utara	2,16	2,91	2,70	2,84	2,93	2,69	Tanggap	B		

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel						Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
196	Kota Tidore Kepulauan	1,85	2,91	2,51	2,56	2,47	2,45	Cukup Tanggap	C	
197	Papua	2,24	3,00	2,84	2,77	3,17	2,76	Tanggap	B	
198	Jayapura	2,19	2,77	2,69	2,45	3,12	2,59	Cukup Tanggap	C	
199	Mimika	2,27	3,22	2,98	3,06	3,21	2,92	Tanggap	B	
200	Sulawesi Barat	1,87	3,23	2,88	2,86	3,09	2,74	Tanggap	B	
201	Poliwali Mandar	1,87	3,23	2,88	2,86	3,09	2,74	Tanggap	B	
202	Sulawesi Utara	1,93	3,16	2,68	2,84	2,82	2,67	Tanggap	B	
203	Kepulauan Sangihe	1,88	3,70	3,29	3,56	2,97	3,06	Tanggap	B	
204	Bolaang Mongondow	1,89	2,99	2,56	2,66	2,88	2,57	Cukup Tanggap	C	
205	Kota Bitung	1,97	2,90	2,40	2,62	2,72	2,52	Cukup Tanggap	C	
206	Kota Manado	1,99	3,04	2,46	2,59	2,71	2,56	Cukup Tanggap	C	
207	Papua Barat	2,00	3,00	2,71	2,77	3,04	2,67	Tanggap	B	
	Rata-Rata Nasional	2,03	3,27	2,85	3,07	3,12	2,85	Tanggap	B

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Drs. Heri Maryadi, M.M.

Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. Mayjen H.R. Edi Sukma km 21 Lido Desa Wates Jaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Jawa Barat 16740

Telepon : (0251) 8222244, 8222260

Faksimili : (0251) 8222260

E-mail : lspbnn@gmail.com Website : www.lspbnn.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PELAKSANA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : SK/ [5] /XII/RH.03/2023/LSPBNN**

**TENTANG
HASIL UJI KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional (LSP BNN) diperlukan Surat Keputusan (SK);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan (SK) hasil uji kompetensi.
- Mengingat : 1. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 301 Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi;
2. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional Konselor Adiksi;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi;
4. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/788/IX/KA/RH.03/2020/BNN tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG HASIL UJI KOMPETENSI**
- Pertama : Hasil uji kompetensi Konselor Adiksi LSP BNN pada tanggal 23 s.d. 25 Agustus Tahun 2023 di BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai mana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ketua LSP BNN.
- Kedua : Menetapkan Kompeten/Belum Kompeten terhadap nama-nama peserta uji kompetensi sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bogor
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

**Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional**

Caca Syahroni, S. IP., M. Si

**HASIL UJI KOMPETENSI KONSELOR ADIKSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

No	Nama Peserta	Instansi/Lembaga	Hasil Asesmen
1.	Dewi Hasta Sari	BNNK Prabumulih	Kompeten
2.	Dian Aprilla, S.Kep	BNNK Ogan Ilir	Kompeten
3.	Oka Dwi Saputra	BNNK Ogan Komering Ilir	Kompeten
4.	Sugeng Riyadi	BNNK Muara Enim	Kompeten
5.	Indra Edy Kristanto	RS Ernaldi Bahar	Kompeten
6.	Bentar Sandy Tyas	IPWL Cahaya Putra Selatan	Kompeten
7.	Donny N.	Yayasan IPWL Karunia Insani	Kompeten
8.	Herliansyah	Yayasan Bina Sriwijaya Persada	Kompeten
9.	Effi Wispida	BNNK Musi Rawas	Belum Kompeten
10.	Ria Mariana	BNN Kota Pagar Alam	Belum Kompeten
11.	Okto Priadi	BNNK Oku Timur	Belum Kompeten
12.	M. Choiruddin Saputra	Dharma Wahyu Insani	Belum Kompeten
13.	Nofran Alhadi	Dharma Wahyu Insani	Belum Kompeten
14.	Mahmud Kurniawan	RS Ernaldi Bahar	Belum Kompeten
15.	PG. Leo Algoritma	RS Ernaldi Bahar	Belum Kompeten

Dikeluarkan di : Bogor
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

**Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional**

Caca Syahroni, S. IP., M. Si

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/50/II/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Exp
Perihal : Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi
SNI Target Reguler Tahun 2023

Jakarta, 09 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Direktorat PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi terhadap lembaga rehabilitasi target SNI reguler BNNP/BNNK/Kab pada bulan Desember 2023 dengan target pemenuhan 70 % s.d. 85%. Adapun daftar lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI tahun 2023 terlampir dengan e-sertifikat menyusul.

3. Berdasarkan dengan butir dua diatas, dimohon Kepala untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga tercapai pemenuhan sempurna pada tahun 2024.

4. Demikian.....

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Ketua Lembaga Rehabilitasi.

**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI YANG MEMENUHI
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 8807:2022 TAHUN 2023**

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	SETTING
1	2	3	4
1	Aceh	Yayasan Alfatha	Ranap Sosial
2		Rumah Geutanyo	Ranap Sosial
3		Yayasan Generasi Emas Aceh	Ranap Sosial
4	Sumatera Utara	Yayasan Haga Christ	Ranap Sosial
5		Klinik Pratama BNNK Gunung Sitoli	Raja Medis
6		Klinik Pratama BNNK Tanjung Balai	Raja Medis
7		Klinik Pratama BNNK Simalungun	Raja Medis
8		Klinik Pratama BNNK Pematang Siantar	Raja Medis
9		Yayasan Mutiara Abadi Binjai	Ranap Sosial
10		Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara	Ranap Sosial
11		Pusat Rehabilitasi Bahri Nusantara	Ranap Sosial
12		Sumatera Barat	Puskesmas Pasar Usang
13	Klinik Intan Sari		Raja Medis
14	Kepulauan Riau	Klinik Pratama BNNP Kepulauan Riau	Raja Medis
15		Yayasan Eka Kapti Abhipraya	Raja Sosial
16	Bangka Belitung	Puskesmas Tanjung Binga	Raja Medis
17		Klinik Bakti Timah Tanjung Pandan	Raja Medis
18		Puskesmas Tempilang	Raja Medis
19	Riau	Klinik Pratama BNNK Dumai	Raja Medis
20		Yayasan Gemuni	Ranap Sosial
21		Yayasan Sarasehan	Ranap Sosial
22	Sumatera Selatan	Klinik Pratama BNNK Ogan Komering Ulu Timur	Raja Medis
23		Klinik Pratama BNNK Prabumulih	Raja Medis
24		Klinik Pratama BNNK Muara Enim	Raja Medis
25	Lampung	Klinik Pratama BNNK Way Kanan	Raja Medis
26		Puskesmas Simpur	Raja Medis
27	Jambi	RSJ Jambi	Ranap Medis
28		Yayasan Karunia Insani	Ranap Sosial

LAMPIRAN
SURAT Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/50/I/DE/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL : 09 Januari 2024

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	SETTING
1	2	3	4
29	Banten	Yayasan Mata Hati Adiksi Indonesia	Ranap Sosial
30	Kalimantan Timur	Puskesmas Bontang Utara	Raja Medis
31	Kalimantan Barat	Klinik Pratama BNNK Bengkayang	Raja Medis
32		Klinik Pratama BNNK Kubu Raya	Raja Medis
33	Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati Bati	Raja Medis
34		RSIA Mutiara Bunda	Raja Medis
35	Kalimantan Tengah	Klinik Pratama BNNP Kalimantan Tengah	Raja Medis
36		RSJD Kalawa Atei	Raja Medis
37	DKI Jakarta	Puskesmas Kec. Grogol Petamburan	Raja Medis
38		Puskesmas Kec. Tambora	Raja Medis
39		Puskesmas Kec. Kelapa Gading	Raja Medis
40		Yayasan Cakra Sehati	Ranap Sosial
41		Yayasan Madani	Ranap Sosial
42	Jawa Tengah	Puskesmas Karanganyar Kebumen	Raja Medis
43		Klinik Pratama BNNK Batang	Raja Medis
44		Klinik Pratama BNNK Temanggung	Raja Medis
45	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNK Cirebon	Raja Medis
46		Klinik Pratama BNNK Sukabumi	Raja Medis
47		Yayasan Graha Suar	Ranap Sosial
48		Puskesmas Karawang Kota	Raja Medis
49		Klinik Pratama BNN Kota Bandung	Raja Medis
50		Klinik Pratama Karya Sehat Nusantara	Raja Medis
51		Graha Prima Karya Sejahtera (GRAPIKS)	Ranap Sosial
52		Klinik Pratama BNNK Sumedang	Raja Medis
53	DI. Yogyakarta	PABM Nawacita	Ranap Sosial
54	Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	Raja Medis
55		Klinik Pratama BNN Kab. Nganjuk	Raja Medis
56		Klinik Pratama BNN Kab. Tulungagung	Raja Medis
57		Yayasan Rumah Merah Putih	Ranap Sosial
58		Klinik Kesehatan Dan Ketergantungan Obat Ghana Prima	Raja Medis

LAMPIRAN
 SURAT Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/50/I/DE/RH.02.03/2024/BNN
 TANGGAL : 09 Januari 2024

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	SETTING
1	2	3	4
59	Jawa Timur	RSJ Menur	Ranap Medis
60		Klinik Pratama BNN Kab. Kediri	Rajal Medis
61		Yayasan Gendhog Nemu Sariro (Gennesa) Banyuwangi	Rajal Sosial
62	Bali	RS. Bhayangkara	Rajal Medis
63	NTB	RSJ Mutiara Sukma NTB	Ranap Medis
64		RSUD Dr. Soedjono Selong	Rajal Medis
65	Sulawesi Utara	Klinik Pratama BNNK Manado	Rajal Medis
66	Sulawesi Selatan	RSKD Provinsi Sulawesi Selatan	Rajal Medis
67		RSUD Sayang Rakyat	Ranap medis
68	Sulawesi Tengah	Klinik Sangurara BNNK Palu	Rajal Medis
69		Klinik Agung	Rajal Medis
70	Gorontalo	Klinik Pratama BNN Kota Gorontalo	Rajal Medis
71		Klinik Pratama BNN Kab. Gorontalo	Rajal Medis
72	Maluku Utara	PKM Ome	Rajal Medis
73	Maluku	RS Bhayangkara Tk.II Ambon	Rajal Medis
74	Papua Barat	Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat	Rajal Medis
75	Papua	Puskesmas Elly Uyo	Rajal Medis

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Deputi Rehabilitasi

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, M.H.S., Ph.D

Tampilkan All ▼ entriCari:

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	Kinerja ↕	Penyerapan ↕	Konsistensi ↕	CRO ↕	Efisiensi ↕	Nilai Efisiensi ↕
76	418537	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Batam Kepulauan Riau	53,86	99,74	99,01	52,99	-15,64	10,90
106	419286	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika	54,05	99,08	97,89	61,21	-20,00	0,00
116	682448	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA	64,98	95,75	7,98	84,83	4,25	60,62
221	689863	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL	73,33	98,39	99,67	80,80	-5,31	36,72
74	418323	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	75,60	98,00	99,83	81,11	-2,32	44,21
135	682630	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	75,62	98,70	99,89	78,37	-0,74	48,16
119	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	77,87	99,42	99,61	82,45	-0,10	49,75
147	682757	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA	78,02	99,83	83,76	87,85	0,81	52,03
142	682701	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	78,27	98,52	98,82	84,24	-0,31	49,23
141	682693	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	78,36	98,43	97,25	77,13	4,57	61,41
145	682736	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU	78,57	96,66	99,31	83,10	0,94	52,36
220	689859	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ROTE NDAO	79,16	96,60	96,91	86,22	0,49	51,22
65	418311	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS	80,09	99,64	98,88	91,43	-2,30	44,24
112	681621	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80,12	96,27	56,64	100,00	3,73	59,34
166	682942	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT	80,29	99,19	98,81	87,43	0,50	51,24
161	682892	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAGARALAM	80,44	95,79	87,87	95,83	-1,16	47,11
82	419203	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	80,92	98,45	97,42	86,84	2,19	55,47
67	418315	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	82,14	99,63	79,15	100,00	0,37	50,93
58	403716	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR	82,34	97,95	98,11	95,67	-1,30	46,75
39	195175	Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka	82,39	99,65	78,85	100,00	0,80	51,99
115	681659	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	82,43	96,32	69,54	100,00	3,68	59,19
114	681642	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	82,82	99,79	83,49	100,00	0,21	50,51
191	689561	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DEPOK	83,06	99,09	99,56	92,89	0,87	52,18
99	419261	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan	83,49	99,90	75,91	100,00	3,06	57,64
100	419262	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna	83,57	99,94	100,00	96,69	-0,96	47,59
101	419263	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOALEMO	83,79	99,98	89,43	100,00	0,02	50,06
217	689821	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR	83,79	98,05	99,77	94,42	1,05	52,62
111	681617	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	83,89	98,09	83,54	100,00	1,91	54,79
59	403717	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	84,01	99,16	99,50	97,69	-0,71	48,21
66	418313	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU	84,03	99,97	90,69	100,00	0,03	50,08
175	689032	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MOROWALI	84,10	97,76	82,79	100,00	2,44	56,10
63	418309	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK	84,27	99,62	90,85	100,00	0,38	50,95
172	683000	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARMASIN	84,27	98,44	86,87	100,00	1,56	53,89
30	145161	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA	84,29	98,25	87,16	99,68	1,72	54,31
168	682960	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PANGKAL PINANG	84,30	97,67	91,85	100,00	0,43	51,08
208	689732	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN POSO	84,47	99,68	99,65	97,92	-0,32	49,21
190	689554	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO	84,50	99,99	91,38	100,00	0,52	51,30
28	120855	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN WAY KANAN	84,77	99,85	94,34	100,00	0,15	50,39
171	682998	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG	84,78	96,18	98,69	95,58	2,26	55,64
25	081240	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASAMAN BARAT	84,84	98,84	97,11	100,00	-0,31	49,21
81	419202	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir	84,87	95,95	81,69	100,00	4,05	60,13
223	689884	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA	84,99	94,45	77,26	100,00	5,55	63,87
85	419224	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus	85,08	99,17	88,21	100,00	2,24	55,61
37	165441	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BONTANG	85,11	99,26	96,57	99,36	0,54	51,35

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	Kinerja ↕	Penyerapan ↕	Konsistensi ↕	CRO ↕	Efisiensi ↕	Nilai Efisiensi ↕
84	419223	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan	85,14	99,22	92,41	100,00	1,26	53,14
131	682590	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI	85,20	99,11	94,26	100,00	0,89	52,21
98	419260	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone	85,22	99,71	93,22	100,00	1,10	52,75
186	689512	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANGHARI	85,24	99,23	96,27	99,74	0,57	51,42
78	419175	Badan Narkotika Nasional Kota Sabang	85,25	98,67	93,03	100,00	1,33	53,32
169	682977	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANJUNG PINANG	85,32	99,97	97,83	100,00	0,03	50,07
133	682612	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	85,33	97,19	98,91	97,12	1,89	54,73
46	310721	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GORONTALO UTARA	85,36	99,98	98,09	100,00	0,02	50,04
155	682832	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU	85,38	99,84	97,67	100,00	0,16	50,41
138	682668	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	85,41	98,93	94,77	100,00	1,07	52,67
60	418305	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ACEH TAMIANG	85,42	99,82	97,89	100,00	0,18	50,44
94	419256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	85,46	99,59	97,30	100,00	0,41	51,01
47	320229	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARIMUN	85,47	99,90	98,37	100,00	0,10	50,26
154	682825	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG	85,53	99,72	98,08	100,00	0,28	50,71
23	075345	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI	85,54	99,92	98,84	100,00	0,08	50,20
96	419258	Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara	85,54	99,21	97,66	99,54	0,75	51,89
97	419259	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow	85,55	99,86	98,70	100,00	0,14	50,35
211	689760	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BITUNG	85,58	99,70	99,78	99,64	0,14	50,36
144	682722	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT	85,62	97,74	98,03	98,84	1,40	53,51
218	689838	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT	85,69	99,88	99,54	100,00	0,12	50,29
136	682647	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	85,72	99,18	97,32	100,00	0,82	52,06
52	403709	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	85,73	99,87	99,71	100,00	0,13	50,33
86	419225	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka	85,75	99,23	97,67	100,00	0,77	51,93
102	419264	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima	85,77	99,89	99,99	100,00	0,11	50,28
48	325136	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATAM	85,78	99,12	97,05	100,00	0,98	52,45
95	419257	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala	85,78	98,26	94,57	100,00	1,74	54,34
27	111079	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	85,79	98,49	95,38	100,00	1,51	53,77
188	689533	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	85,79	99,39	98,42	100,00	0,61	51,52
126	682541	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	85,81	98,70	96,21	100,00	1,30	53,25
150	682782	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN	85,82	99,68	99,50	100,00	0,34	50,84
33	150958	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	85,85	99,69	99,76	100,00	0,31	50,78
68	418316	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO	85,89	99,77	98,42	100,00	0,70	51,76
160	682888	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LANGSA	85,90	99,65	99,92	100,00	0,35	50,87
69	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	85,92	99,95	99,73	100,00	0,38	50,95
214	689795	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO	85,93	99,31	95,70	100,00	1,52	53,79
173	689011	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARBARU	85,94	99,00	99,55	100,00	0,59	51,47
209	689749	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA	85,94	98,69	96,88	100,00	1,31	53,26
64	418310	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM	85,97	99,26	98,93	100,00	0,74	51,86
88	419227	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	85,98	99,65	98,34	100,00	0,85	52,14
134	682626	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	85,99	99,51	84,42	100,00	4,44	61,10
14	052858	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TUBAN	86,00	99,72	96,95	100,00	1,24	53,09
36	165352	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN	86,00	99,49	99,91	100,00	0,51	51,27
103	419265	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu	86,02	99,38	93,74	100,00	2,13	55,32
174	689025	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA	86,02	99,23	99,16	100,00	0,77	51,92
75	418324	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA	86,05	99,41	99,95	100,00	0,59	51,46
18	065137	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH	86,08	98,93	98,44	100,00	1,07	52,69
204	689692	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MEMPWAH	86,08	99,14	99,13	100,00	0,86	52,16
31	150243	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANAH LAUT	86,09	99,85	99,89	99,17	1,10	52,76
56	403714	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG	86,16	98,64	97,89	100,00	1,36	53,41

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	Kinerja ↕	Penyerapan ↕	Konsistensi ↕	CRO ↕	Efisiensi ↕	Nilai Efisiensi ↕
110	681600	INSPEKTORAT UTAMA	86,17	99,18	99,80	100,00	0,82	52,04
163	682914	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,17	99,46	99,95	100,00	0,74	51,86
13	045165	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA	86,22	99,02	99,54	100,00	0,98	52,45
148	682761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	86,22	97,84	99,75	98,61	1,93	54,82
149	682778	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GARUT	86,22	99,14	99,92	100,00	0,86	52,15
70	418318	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TASIKMALAYA	86,23	98,92	99,24	100,00	1,08	52,70
104	419279	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buru Selatan	86,23	99,03	99,51	100,00	1,00	52,51
187	689529	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU	86,23	99,52	98,48	100,00	1,19	52,97
212	689774	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MANADO	86,23	98,36	99,02	100,00	1,21	53,03
170	682981	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK	86,25	99,74	99,59	100,00	0,91	52,26
178	689067	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	86,27	99,04	99,87	100,00	0,96	52,40
197	689622	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG	86,28	99,82	99,89	100,00	0,87	52,17
19	070258	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARO	86,31	99,55	99,39	100,00	1,07	52,68
156	682846	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG	86,31	99,55	99,56	100,00	1,03	52,58
222	689870	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN	86,31	98,81	99,30	100,00	1,19	52,98
129	682579	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA	86,32	98,90	98,46	100,00	1,40	53,51
105	419280	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai	86,34	98,76	99,32	100,00	1,24	53,09
10	035665	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA	86,36	98,73	97,30	100,00	1,78	54,44
7	026118	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIMAHI	86,37	99,85	99,40	100,00	1,10	52,76
205	689707	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN	86,37	99,47	99,90	100,00	1,03	52,57
4	020761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIANJUR	86,40	99,74	99,96	100,00	1,02	52,55
164	682921	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG	86,41	99,80	99,97	100,00	1,03	52,58
162	682900	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU	86,42	98,66	99,38	100,00	1,34	53,36
53	403710	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DUMAI	86,47	96,86	93,59	100,00	3,14	57,85
107	648961	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	86,49	98,08	97,83	100,00	1,92	54,79
185	689508	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI	86,49	98,48	99,17	100,00	1,52	53,81
8	031963	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MAGELANG	86,50	99,41	96,40	100,00	2,11	55,28
167	682956	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH	86,56	99,21	99,61	100,00	1,42	53,54
17	061818	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE JAYA	86,57	98,10	98,34	100,00	1,90	54,75
9	032057	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG	86,58	99,92	98,87	100,00	1,52	53,81
219	689842	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG	86,58	98,73	99,32	100,00	1,58	53,94
45	310153	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GORONTALO	86,62	98,10	96,58	100,00	2,41	56,03
122	682502	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	86,62	99,45	99,61	100,00	1,45	53,64
61	418307	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE	86,63	98,12	98,72	100,00	1,88	54,69
213	689781	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GORONTALO	86,64	99,55	99,79	100,00	1,43	53,57
5	025137	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDUNG	86,69	99,27	99,55	100,00	1,60	54,00
40	205232	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BAU-BAU	86,73	100,00	97,88	100,00	1,98	54,94
153	682811	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KENDAL	86,74	99,99	99,96	100,00	1,47	53,67
179	689444	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIREUEN	86,77	98,22	99,85	100,00	1,78	54,45
90	419246	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas	86,83	99,86	98,20	100,00	2,06	55,15
24	075540	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANJUNG BALAI	86,84	98,84	99,02	100,00	2,00	55,00
83	419222	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan	86,84	96,68	98,38	100,00	2,45	56,13
132	682605	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU	86,84	99,03	94,98	100,00	3,00	57,50
152	682804	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP	86,86	99,60	99,40	100,00	1,83	54,56
151	682799	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS	86,88	98,09	99,35	100,00	2,08	55,20
118	682469	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT	86,89	99,17	99,71	100,00	1,84	54,61
206	689711	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU	86,89	99,08	99,05	100,00	2,04	55,09
201	689664	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR	86,91	99,26	99,70	100,00	1,86	54,66
42	220348	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG	86,94	98,83	99,78	100,00	1,94	54,86

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	Kinerja ↕	Penyerapan ↕	Konsistensi ↕	CRO ↕	Efisiensi ↕	Nilai Efisiensi ↕
146	682740	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	86,94	99,33	98,66	100,00	2,17	55,42
20	070545	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN	86,95	99,72	99,12	100,00	2,01	55,03
62	418308	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEBING TINGGI	86,95	99,85	99,48	100,00	1,89	54,74
12	040256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	86,96	99,84	97,74	100,00	2,36	55,90
22	072117	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATU BARA	86,96	99,46	99,60	100,00	1,93	54,83
26	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	86,97	99,07	99,57	100,00	2,01	55,04
57	403715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASURUAN	86,97	98,79	99,82	100,00	1,99	54,98
121	682494	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	87,02	98,97	99,14	100,00	2,20	55,51
3	020558	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOGOR	87,04	99,98	97,68	100,00	2,47	56,18
139	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	87,04	99,25	97,24	100,00	2,68	56,69
140	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	87,04	98,47	99,57	100,00	2,19	55,48
128	682562	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	87,06	98,55	99,70	100,00	2,18	55,45
193	689582	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANG	87,10	99,40	98,11	100,00	2,53	56,31
189	689540	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG	87,12	98,67	99,52	100,00	2,29	55,73
117	682452	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN	87,18	99,19	99,93	100,00	2,20	55,51
11	040173	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL	87,20	99,54	99,77	100,00	2,23	55,56
184	689490	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH	87,23	98,24	95,23	100,00	3,59	58,98
29	130761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BENGKAYANG	87,30	98,27	99,86	100,00	2,51	56,26
16	061331	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GAYO LUES	87,35	98,18	99,69	100,00	2,63	56,57
80	419177	Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto	87,35	98,67	99,79	100,00	2,54	56,34
120	682480	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	87,37	99,00	98,87	100,00	2,76	56,90
216	689817	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BADUNG	87,38	99,25	99,93	100,00	2,47	56,17
200	689650	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG	87,40	97,53	99,38	100,00	2,86	57,16
43	220547	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM	87,41	96,93	98,96	100,00	3,07	57,69
109	681595	SEKRETARIAT UTAMA	87,42	96,20	96,22	100,00	3,88	59,71
113	681638	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	87,45	99,48	97,42	100,00	3,18	57,94
207	689728	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DONGGALA	87,48	98,66	99,89	100,00	2,70	56,76
158	682867	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM	87,50	100,00	100,00	100,00	2,52	56,29
38	190633	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA	87,53	99,74	98,32	100,00	3,02	57,56
15	060534	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ACEH SELATAN	87,54	97,34	99,43	100,00	3,08	57,70
2	015515	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA TIMUR	87,59	96,65	99,00	100,00	3,35	58,38
127	682558	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU	87,62	99,01	99,86	100,00	2,85	57,14
41	220155	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG	87,65	99,74	99,88	100,00	2,79	56,97
93	419249	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SINTANG	87,68	98,93	99,82	100,00	2,95	57,39
194	689596	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PURBALINGGA	87,73	99,97	99,70	100,00	2,92	57,30
73	418322	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	87,77	98,66	99,25	100,00	3,27	58,17
181	689465	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,78	99,32	99,89	100,00	3,02	57,56
198	689639	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK	87,87	99,95	99,18	100,00	3,24	58,11
6	025447	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON	87,89	99,68	99,83	100,00	3,16	57,89
159	682871	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LHOKSEUMAWE	87,89	99,54	99,07	100,00	3,36	58,41
124	682520	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	87,93	99,11	99,92	100,00	3,26	58,15
195	689601	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA	87,96	99,70	99,32	100,00	3,37	58,42
54	403711	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG	87,99	99,40	99,64	100,00	3,38	58,44
182	689472	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN	88,09	99,89	99,84	100,00	3,39	58,48
51	403708	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	88,10	98,74	97,38	100,00	4,19	60,48
91	419247	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep	88,10	98,65	99,14	100,00	3,76	59,41
177	689050	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOLAKA	88,10	98,70	99,09	100,00	3,76	59,40
183	689486	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	88,12	97,57	97,47	100,00	4,35	60,89
1	015405	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN	88,16	99,28	95,65	100,00	4,64	61,61

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja	Kinerja ↑↓	Penyerapan ↑↓	Konsistensi ↑↓	CRO ↑↓	Efisiensi ↑↓	Nilai Efisiensi ↑↓
44	295420	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN	88,28	98,27	98,53	100,00	4,21	60,53
87	419226	Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon	88,28	99,89	99,85	100,00	3,66	59,16
89	419228	Badan Narkotika Nasional Kota Tegal	88,33	99,70	96,11	100,00	4,72	61,79
125	682537	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	88,33	98,14	94,63	94,87	8,42	71,05
215	689800	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DENPASAR	88,39	95,49	99,47	100,00	4,51	61,27
157	682850	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK	88,58	99,92	97,58	100,00	4,66	61,65
192	689575	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG	88,73	99,77	98,15	100,00	4,74	61,86
71	418319	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA	88,74	99,73	99,93	100,00	4,31	60,78
92	419248	Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto	88,74	100,00	99,32	100,00	4,43	61,07
123	682516	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI	88,79	99,04	99,86	100,00	4,49	61,23
199	689643	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK	88,79	99,86	99,94	100,00	4,36	60,90
165	682935	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEMATANG SIANTAR	88,95	97,57	98,69	100,00	5,21	63,02
55	403713	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGKA SELATAN	89,03	94,01	97,99	100,00	5,99	64,97
210	689753	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI	89,16	98,35	99,65	100,00	5,15	62,87
180	689451	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ASAHAN	89,28	99,18	99,55	100,00	5,23	63,08
35	165249	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BALIKPAPAN	89,39	99,10	99,84	100,00	5,32	63,30
176	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	89,59	99,68	96,86	100,00	6,28	65,71
203	689685	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU	89,66	99,58	99,97	100,00	5,60	64,01
50	352629	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	89,86	97,69	96,22	100,00	7,09	67,73
49	352628	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	90,02	98,11	87,01	100,00	9,60	74,01
79	419176	Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli	90,10	95,37	99,13	100,00	7,00	67,50
196	689618	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI	90,24	96,36	98,24	100,00	7,29	68,22
202	689671	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEDIRI	90,47	99,99	99,94	100,00	6,69	66,72
137	682651	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	90,66	99,34	96,42	100,00	7,94	69,84
32	150751	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TABALONG	91,08	99,37	83,72	100,00	11,75	79,38
108	670688	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	91,10	97,28	99,20	100,00	8,12	70,31
34	165162	Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah	91,47	96,01	99,53	100,00	8,73	71,82
21	070639	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,68	98,76	93,68	100,00	10,14	75,36
130	682583	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	94,19	98,76	95,78	100,00	13,11	82,78
72	418320	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NUNUKAN	95,06	96,92	97,84	100,00	14,05	85,13
143	682715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO	96,12	98,80	98,72	100,00	15,07	87,67
77	418543	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Kalianda Lampung Selatan	97,04	99,91	90,48	100,00	18,30	95,75

Menampilkan 1 sampai 223 dari 223 entri

[Sebelumnya](#)
[1](#)
[Selanjutnya](#)